

SKRIPSI



PENYELESAIAN POTENSI SENGKETA DI WILAYAH PERAIRAN *SOUTH CHINA SEA (SCS)* ANTAR NEGARA-NEGARA DI KAWASAN ASEAN DALAM PERSPEKTIF REGIONALISME

OLEH:

YOLANDA MOUW

B111 10 114

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

PERSETUJUAN MENEMPUPH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **YOLANDA MOUW**

No. Pokok : B111 10 114

Bagian : Hukum Internasional

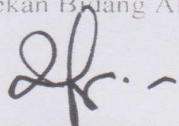

Judul Skripsi : Penyelesaian Potensi Sengketa di Wilayah Perairan South China Sea (SCS) antar Negara-Negara di Kawasan ASEAN dalam Perspektif Regionalisme

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2014

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik.


Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003 

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa;

Nama : Yolanda Mouw

Nomor Induk : B111 10 114

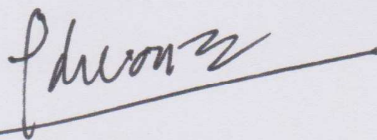
Bagian : Hukum Internasional

Judul : Penyelesaian Potensi Sengketa Di Wilayah Perairan *South China Sea (Scs)* Antar Negara-Negara Di Kawasan ASEAN Dalam Perspektif Regionalisme.

Telah diperiksa dan disetujui untuk dilanjutkan dalam ujian skripsi.

Makassar, 13 Februari 2014

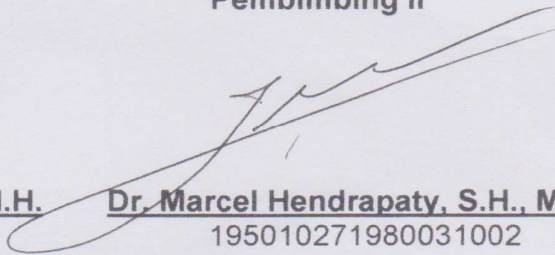
Pembimbing I



Dr. Maasba Magassing, S.H., M.H.

195508031984031002

Pembimbing II



Dr. Marcel Hendrapaty, S.H., M.H.

195010271980031002

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENYELESAIAN POTENSI SENGKETA DI WILAYAH PERAIRAN *SOUTH CHINA*
SEA (SCS) ANTAR NEGARA-NEGARA DI KAWASAN ASEAN DALAM
PERSPEKTIF REGIONALISME**

Disusun dan diajukan oleh

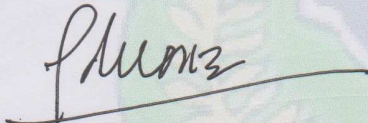
YOLANDA MOUW

B111 10 114

Telah Dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 27 Februari 2014
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H.
NIP. 19550803 198403 1 002

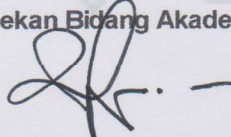
Sekretaris



Dr. Marcel Hendrapaty, S.H., M.H.
NIP. 19501027 198003 1 002

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1003

ABSTRACT

Yolanda Mouw (B111 10 114). The Settlement of the Potential Conflict in the Water Area of the South China Sea (SCS) between the states in ASEAN region using regionalism perspective. Guided by Mr. Maasba Magassing and Mr. Marcel Hendrapaty.

The purpose of this research is to figure out how to settle the potential conflict in the water area of South China Sea (SCS) between the states in ASEAN region using regionalism perspective and also to know the role of ASEAN community in order to settle the conflict between the states that claim the water area of the South China Sea (SCS). The writer done this research by using the "literature research" method or literature study that combine with interview method with many competent parties that can help writing this thesis (undergradual).

The result of this research is this: (1) In order to settle this potential conflict in the water area of the South China Sea (SCS), ASEAN is supported by DOC (Declaration of the Conduct of Parties in the South China Sea). DOC is a first collective political document that is coming out of the member of ASEAN community and China on the issue of South China Sea (SCS). This document reflects the consensus that every side achieve to find the peace solutions and to be doing the maritime cooperation in order to maintain the regional stabilization in South China Sea (SCS) under the principles that universally accepted in International Law, The Convention of the United Nation on 1982 about Law of the Sea, and Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia. (2) Every parties firm their commitments to honest and sincere apply the DOC in order to give the contribution of peace and regional stabilization in South China Sea (SCS).

Based on this research, Writer formulates that the settlements of the potential conflict in the water area of South China Sea (SCS) need to be more maximal, in order to prevent the expansion of the potential conflict that involve some regional in states like China, Vietnam, Malaysia, Philippines, and Brunei. The settlement mechanism based on the instruments that made by ASEAN need to become a priority before it takes to international level as a form of ASEAN as the organization that effective to create stabilization, peace, and security in regional. And the states that claim the area have to respect the DOC, the settlement of territorial conflict have to be based on the convention of the United Nation on 1982 about Law of the Sea, and to settle peacefully without any violence.

ABSTRAK

Yolanda Mouw (B111 10 114). Penyelesaian Potensi Sengketa di wilayah perairan *South China Sea* (SCS) antar negara-negara di kawasan ASEAN dalam Perspektif Regionalisme. Dibimbing oleh Maasba Magassing dan Marcel Hendrapaty.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian potensi sengketa di wilayah perairan *South China Sea* (SCS) antar negara-negara di kawasan ASEAN dalam Perspektif Regionalisme serta bagaimana Peran Organisasi ASEAN dalam menangani Konflik yang terjadi diantara negara kawasan tersebut yang menjadi negara pengklaim atas wilayah perairan *South China Sea* (SCS). Penelitian ini dilakukan dengan metode “*literature research*” atau melalui studi literatur yang juga dirangkaikan dengan metode wawancara dengan berbagai pihak yang kompeten dalam penulisan skripsi ini.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) dalam menangani potensi sengketa di wilayah perairan *South China Sea* (SCS), ASEAN bertumpu pada DOC (Declaration of the Conduct of Parties in the *South China Sea* (SCS)). DOC adalah dokumen politik pertama bersama yang dikeluarkan oleh negara-negara anggota ASEAN dan China pada *isu South China Sea* (SCS). Dokumen ini mencerminkan konsensus yang dicapai oleh semua Pihak untuk mencari solusi damai dan melakukan kerjasama maritim dalam rangka menjaga stabilitasi regional di *South China Sea* (SCS) di bawah prinsip-prinsip yang diakui secara universal dalam Hukum Internasional, Konvensi PBB 1982 tentang Hukum laut, Traktat Persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara. (2) dalam hal ini semua Pihak menegaskan kembali komitmen mereka untuk tulus dan setia menerapkan DOC dalam rangka memberikan kontribusi bagi perdamaian dan stabilitas regional di *South China Sea* (SCS).

Berdasarkan hasil penelitian, Penulis merumuskan agar penyelesaian potensi sengketa di wilayah perairan *South China Sea* (SCS) lebih dimaksimalkan, untuk mencegah meluasnya potensi konflik yang melibatkan beberapa negara di kawasan seperti Cina, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei. Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan instrumen-instrumen yang telah dibuat oleh ASEAN perlu diprioritaskan sebelum dibawa pada tingkat internasional sebagai bentuk efektifitas ASEAN sebagai organisasi regional yang mampu menciptakan stabilitas, keamanan dan perdamaian di kawasan. Dimana Negara-negara yang menjadi negara pengklaim harus menghormati DOC, dan penyelesaian sengketa teritorial sesuai dengan konvensi PBB 1982 tentang Hukum laut, penyelesaian secara damai tanpa melalui cara-cara kekerasan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang tak terhingga Penulis Ucapkan atas berkat dan kasih setiaNya yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan utama penulis sampaikan kepada kedua orang tua Penulis, Imanuel Mouw, SH dan Femmy Rosalina M.P yang telah membesarkan dan telah memenuhi semua kebutuhan penulis hingga saat ini. Selalu sabar dalam menghadapi penulis dan tak henti-hentinya memberikan nasihat dan *support* kepada penulis. Serta tidak henti-hentinya menyanggupi berbagai keinginan Penulis. Penulis juga menyadari bahwa tanpa Doa dan dukungan yang diberikan oleh mereka, Penulis tidak akan mampu menjadi seperti ini dan menjadi Pribadi yang lebih baik. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketiga kakak Penulis yaitu Ira Imelda, Debby Natalia, Harsz Mouw, serta keluarga besar penulis yang tidak henti-hentinya memberikan *support* dan Doanya untuk segera menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan rampung tanpa adanya bantuan, baik materiil maupun non-materiil yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. Aswanto, S.H., M.H., DFM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin beserta para Wakil Dekan, antara

lain Bapak Prof. DR. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., Bapak DR. Anshori Illyas, S.H., M.H., dan Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H., atas berbagai bantuan yang diberikan kepada Penulis, baik bantuan untuk menunjang berbagai kegiatan individual maupun yang dilaksanakan oleh Penulis bersama organisasi lain di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

2. Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu bagi penulis untuk konsultasi selama pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).
3. Bapak Dr. Abd. Maasba Magassing, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Marcel Hendrapaty, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang sangat membantu, kooperatif, memudahkan, dan bahkan memberikan masukan-masukan dan berbagai literatur kepada penulis sebagai bahan untuk menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini. Sungguh penulis sangat bersyukur memiliki pembimbing seperti Bapak.
4. Ibu Prof. Dr. Alma Manuputty, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H., dan Ibu Inneke Lihawa, S.H., M.H., sebagai tim penguji yang telah memberikan masukan, kritik, serta pengalaman berharga dalam proses penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini. serta Bapak Albert Lakollo, S.H., M.H.,

sebagai dosen penguji pengganti terima kasih untuk waktunya, masukan, dan kritik yang membangun.

5. Segenap dosen pengajar hukum internasional yang telah berbagi ilmu, cerita, pengalaman, dan tawa. Juga atas pemahaman baru yang telah diberikan kepada Penulis mengenai makna menjadi seorang pengajar yang betul-betul mencerminkan pribadi sebagai pengajar yang ideal, pengajar yang *humble* dan *mingle* dengan mahasiswanya.

Terimakasih

6. Seluruh tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddn yang telah bersedia memberikan ilmunya kepada penulis, Semoga Tuhan yang Maha Kuasa Membalas jasa Bapak dan Ibu sekalian.
7. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas arahan, bantuan, dan kesabarannya dalam menghadapi Penulis.
8. Staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, atas perubahan positif yang sangat signifikan terhadap ruang baca ini.
9. Mas Daniel Simanjuntak, Mba Melisa Repi, mba Yanti selaku pejabat fungsional Direktorat Politik Keamanan ASEAN yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk penulis dalam memperoleh data.
10. Ibu Sarah Handayani, Ibu Hanika Winahayu selaku pejabat Fungsional ASEAN Secretariat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis dalam memperoleh data.

11. Sahabat-sahabat penulis sejak berstatus Mahasiswa Baru hingga penyusunan proposal dan skripsi Faradillah Diputri Ashan, Andi Dewi Purnama Sari, Aslinda Tahir, Syarafina Ramlah dan Noldy Pinontoan. Sahabat dalam berbagai suka dan duka, baik di dalam maupun luar dunia perkuliahan.
12. Keluarga besar Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (PMK FH_UH) Terima kasih untuk Doa dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini, dan PA (Pintu Angin) sebagai rumah kecil selama perkuliahan dan tempat berbagi canda tawa. Sahabat-sahabat PMK Raya Batara, Fenni Pratama Bassi, Chica Mustika Baan, Melita Aruan Dawa, Palantunan, Agung, Cesar, James Senduk, Samuel Pirade, Sepri, Andika, Dimas Tegar, Yori, Fera, untuk kebersamaan dan pengalaman yang tak terlupakan, dan semua teman-teman seangkatan yang masih berjuang untuk judul, proposal n skripsi, KEEP FIGHTING ! I Love you Bakutumbu.
13. Keluarga besar *Regional Moot Court Competition 2012 crew*, Zulfikar, Muh. Farit Ode Kamaru, Junaedi Azis, L. O. Bahrusyawal, Andi Mekasari, Rini Ariani Said, Ilham Sardi, Andi Dzul Ikham, Amiruddin, Sri Amalina dan Gunawan. Terimakasih atas pengalaman berharganya, tidak akan terlupakan. Kebersamaan yang terbina kurang lebih tiga bulan lamanya memberikan perubahan positif yang sangat besar terhadap penulis.

14. Rekan-rekan seperjuangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) gelombang 85 Padang, Terima kasih telah berbagi pengalaman dan kebersamaan yang tak terlupakan selama 1 bulan melaksanakan KKN di kota Minang, keluarga lubuak Jantan Uni nel dan sahabat-sahabat KKN di Lintau Buo Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu namanya. Menemukan banyak perbedaan tapi itulah yang membangun keakraban bersama kalian, beruntungnya kenal orang-orang seperti kalian. Sukses selalu.
15. Keluarga Besar Unit kegiatan Mahasiswa Bola basket Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tim basket Hukum terima kasih untuk pengalamannya, senang mengenal kalian.
16. Keluarga Besar Cenderawasi Basketball Competition (CBC), terima kasih untuk pengalamannya, senang mengenal kalian.
17. Teman-teman Legitimasi 2010 yang saat ini juga tengah menyusun judul, proposal maupun skripsi, Semangat!
18. Sahabat-sahabat tercinta Penulis sebelum menginjakan kaki di bangku perkuliahan sampai sekarang Caroline Ever Tubaran, Christine Johanna Mailoa, Merly Sapan, Gretha Junita, Ryan Christian Salim, Arijan Benyamin Rudolf Sumanti, Gery, Frangky, Daus, Anugrah Pratama, terima kasih untuk kebersamaan dan pengalaman-pengalaman tergokil, waktu ngumpul yang ngaretnya dua jam, dan berbagai kegemaran makanan, tapi banyak protesnya. Terima kasih

untuk *support* kalian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

God Bless You.

Demikian ucapan terima kasih ini penulis buat. Mohon maaf yang terdalam jika penulisan nama dan gelar tidak sesuai. Terima kasih atas segala Bantuan, Doa, dan dukungan yang telah diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalasnya.

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	<i>Association of South East Asia Nation</i>
ABR	<i>ASEAN Baseline Report</i>
ACC	<i>ASEAN Coordinating Council</i>
ACFTA	<i>ASEAN-China Free Trade Agreement</i>
AFAS	<i>ASEAN Framework Agreement on Services</i>
ARISE	<i>ASEAN Regional Integration Support from the European Union</i>
AFTA	<i>ASEAN Free Trade Area</i>
AIPR	<i>Institute for Peace and Reconciliation</i>
APSC	<i>ASEAN Political-Security Community</i>
ASCC	<i>ASEAN Socio-Cultural Community</i>
ATIGA	<i>ASEAN Trade in Goods Agreement</i>
ATR	<i>ASEAN Trade Repository</i>
CLMV	<i>Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam</i>
COC	<i>Code of Conduct</i>
DSB	<i>Dispute Settlement Body</i>
DSU	<i>Dispute Settlement Understand</i>
DOC	<i>Declaration On the Conduct</i>
EDSM	<i>Enhanced Dispute Settlement Mechanism</i>
EPG	<i>Eminent Persons Group</i>

EU	<i>European Union</i>
HAM	Hak Asasi Manusia
HCA	<i>Host Country Agreement</i>
HLTF	<i>High Level Task Force</i>
HKI	Hak atas Kekayaan Intelektual
IAI	<i>Inisiative for ASEAN Integration</i>
ICJ	<i>International Court f Justice</i>
IL	<i>Inclusion List</i>
ICRC	<i>International Committee of the Red Cross</i>
ILC	<i>International Law Commission</i>
KTT	Konferensi Tingkat Tinggi
MI	Mahkamah Internasional
MPI	Mahkamah Pidana Internasional
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perpres	Peraturan Presiden
PIS	<i>Sectors Integration Priority</i>
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PoA	<i>Plan of Action</i>
PTA	<i>Preferential Trading Arrangement</i>
SCPP	<i>Self Certification Pilot Project</i>
SEATO	<i>Southeast Asia Treaty Organization</i>
TAC	<i>Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia</i>

ToR	<i>Term of Referenceation</i>
UNCLOS	<i>United Nantion Convention in the Law of the Sea</i>
ZOPFAN	<i>Zone of Peace, Freedom, and Neutrality Declaration</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJUIAN SKRIPSI	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR ISI	xvi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penulisan	9

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sejarah Terbentuknya ASEAN	10
2.2. Basic Instrumen Hukum Laut	16
2.2.1. Konvensi Hukum Laut 1982	17
2.2.2. Peraturan mengenai Perairan Nasional di Masing-masing Negara wilayah ASEAN yang Bersengketa di South China Sea (SCS)...	22
2.2.2.1. Pengertian Regionalisme.....	22
2.2.2.2. Vietnam	25
2.2.2.3. Philipina	25
2.2.2.4. Malaysia	26
2.2.2.5. Brunei Darusalam	26
2.3. Instrumen Penyelesaian Sengketa Internasional.....	27
2.3.1. Penyelesaian Sengketa melalui Organisasi Regional.....	27
2.3.2. Penyelesaian Sengketa melalui PBB	29
2.4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ditingkat Regional.....	32

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	35
3.2. Lokasi Penelitian	36
3.3. Sumber Data	36
3.4. Analisis Data	37

BAB 4 PEMBAHASAN

4.1. UNCLOS sebagai landasan Hukum Internasional dalam penyelesaian sengketa wilayah	38
4.2. Peran Organisasi ASEAN dalam Menangani dan menyelesaikan Potensi Sengketa di wilayah Perairan <i>South China Sea</i> (SCS).....	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebuah kawasan atau negara di belahan bumi ini akan menjadi primadona bagi kawasan atau negara yang mempunyai nilai strategis yang bisa mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan kawasan dari negara tertentu. Asia Tenggara merupakan suatu kawasan yang amat strategis karena terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, karena kekayaan alamnya dan karena potensi pasarnya sudah sering ditonjolkan. Yang tidak sering dikemukakan ialah sifat maritime kawasan ini, yang tidak saja menyediakan sumber alam mineral dan hayati bagi kehidupan penduduknya, melainkan dapat pula merupakan sumber destabilisasi, apabila kemampuan untuk mengelolanya, untuk mengawasi dan mengamankannya tidak memadai.

Demikian halnya dengan *South China Sea (SCS)*, yang pada satu pihak menyediakan sumber kehidupan bagi orang-orang yang berdiam disekitarnya, tetapi pada lain pihak merupakan sumber persengketaan. Ia juga memiliki banyak potensi kerja sama. Semua negara Asia Tenggara berbatasan dengan *South China Sea (SCS)*, dan sebagai akibat timbullah

berbagai macam masalah lalu lintas di antara negara-negara yang berbatasan dengannya.

Dalam hal ini *South China Sea (SCS)* banyak menimbulkan permasalahan di antara negara-negara ASEAN sendiri Karena Geografis *South China Sea (SCS)* dikelilingi sepuluh negara pantai (RRC dan Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina). dan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, serta antara negara-negara Asia Tenggara dengan negara-negara di luar wilayah Asia Tenggara.¹

Sengketa teritorial di kawasan khususnya sengketa atas kepemilikan Kepulauan Spatly dan Kepulauan Paracel mempunyai perjalanan sejarah konflik yang panjang. Sejarah menunjukkan bahwa, penguasaan kepulauan ini telah melibatkan banyak negara diantaranya Inggris, Prancis, Jepang, RRC, Vietnam, yang kemudian melibatkan pula Malaysia, Brunei, Filipina dan Taiwan. Sengketa teritorial di kawasan *South China Sea (SCS)* bukan hanya terbatas pada masalah kedaulatan atas kepemilikan pulau-pulau, tetapi juga bercampur dengan masalah hak berdaulat atas Landas Kontinen dan ZEE serta menyangkut masalah

¹C.P.F. Luhulima, *ASEAN Menuju Postur Baru*, (Jakarta: Centre For Strategic and International Studies (CSIS), 1997), hlm. 283.

penggunaan teknologi baru penambangan laut dalam (dasar laut) yang menembus kedaulatan negara.

Sengketa teritorial dan penguasaan kepulauan, diawali oleh tuntutan Cina atas seluruh pulau-pulau di kawasan *South China Sea* (SCS) yang mengacu pada catatan sejarah, penemuan situs, dokumen-dokumen Kuno, peta-peta, dan penggunaan gugus-gugus pulau oleh nelayannya. Menurut Cina, sejak 2000 tahun yang lalu, *South China Sea* (SCS) telah menjadi jalur pelayaran bagi mereka. Namun Vietnam membantahnya dan menganggap kepulauan spartly dan paracel adalah bagian dari wilayah kedaulatannya. Vietnam menyebutkan kepulauan spartly dan paracel secara efektif didudukinya sejak abad ke 17 ketika kedua kepulauan itu tidak berada dalam penguasaan suatu negara. Dalam perkembangannya, Vietnam tidak mengakui wilayah kedaulatan Cina di kawasan tersebut, sehingga pada saat perang dunia II berakhir Vietnam selatan menduduki kepulauan paracel, termasuk beberapa gugus pulau di kepulauan spartly.

Selain Vietnam selatan kepulauan spartly juga diduduki oleh Taiwan sejak perang dunia II dan filipina tahun 1971 sedangkan filipina menduduki kelompok gugus pulau di bagian timur kepulauan spartly yang disebut sebagai kelayaan, tahun 1978 menduduki lagi gugus pulau panata. Alasan Filipina menduduki kawasan tersebut karena kawasan itu

merupakan tanah yang tidak sedang dimiliki oleh negara-negara manapun.

Filipina juga menunjuk perjanjian perdamaian San Francisco 1951, yang antara lain menyatakan, Jepang telah melepas haknya terhadap kepulauan *Spartly*. Malaysia juga menduduki beberapa gugus pulau kepulauan *Spartly* yang dinamai *Terumbu Layang*. Menurut Malaysia, langkah itu diambil berdasarkan peta batas landas kontinen Malaysia tahun 1979, yang mencakup sebagian dari kepulauan *Spartly*. Dua kelompok gugus pulau lain, juga diklaim Malaysia sebagai wilayahnya yaitu *Terumbu Laksmana* diduduki oleh Filipina dan *Amboyna* diduduki Vietnam. Sementara, Brunei Darussalam yang memperoleh kemerdekaan secara penuh dari Inggris 1 Januari 1984 kemudian juga ikut mengklaim wilayah di kepulauan *Spartly*. Namun, Brunei hanya mengklaim perairan dan bukan gugus pulau. Klaim tumpang tindih tersebut mengakibatkan adanya pendudukan terhadap seluruh wilayah kepulauan bagian selatan kawasan *South China Sea (SCS)*.

Sampai saat ini, negara yang aktif menduduki disekitar kawasan ini adalah Taiwan, Vietnam, Filipina dan Malaysia. Dengan kondisi seperti ini, masalah penyelesaian sengketa teritorial di *South China Sea (SCS)* tampaknya semakin rumit dan membutuhkan mekanisme pengelolaan yang lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan akses-akses instabilitas di

kawasan. Kawasan *South China Sea (SCS)* Khususnya sengketa mengenai Kepulauan *Spartly* yang mempunyai cadangan minyak dan gas alam 17,7 miliar ton (1.60×10^{10} kg), mempunyai cadangan minyak terbesar dunia dengan jumlah 13 miliar ton ($1,17 \times 10^{10}$ kg).²

Sikap dan keutuhan ASEAN. Peran kekuatan ekstra kawasan dalam sengketa tidak dapat dilepaskan pula dari “undangan” terselubung beberapa negara ASEAN yang berstatus negara pengklaim yang bersambut karena kekuatan-kekuatan ekstra kawasan juga memiliki kepentingan terkait Munculnya “undangan” tersebut pada dasarnya didasari oleh ketidakyakinan beberapa negara ASEAN yang berstatus pengklaim akan sikap dan keutuhan ASEAN menghadapi Cina. Memang negara-negara ASEAN terikat pada DOC *South China Sea (SCS)*, akan tetapi sulit dipungkiri pula tentang soliditas ASEAN guna menghadapi Cina. Vietnam dan Filipina selama 2011 merupakan negara yang aktif menegaskan sikapnya terhadap klaim sepihak Cina, sehingga tak aneh kalau kedua negara mendapat perhatian khusus dari Cina.

Sikap kedua negara ASEAN itu tidak lepas dari dukungan diam-diam dari kekuatan ekstra kawasan, walaupun Vietnam tidak memiliki perjanjian aliansi pertahanan dengan kekuatan ekstra kawasan yang

² <http://irjournal.webs.com/apps/blog/show/4113964>, di akses, Pukul 02.53. 18 Januari 2014.

selama ini aktif berperan di *South China Sea (SCS)*. Selain itu, antar negara ASEAN yang terlibat sengketa pun masih berbeda pendapat soal garis batas klaim masing-masing, misalnya antara Malaysia dan Filipina.

Sampai sejauh ini, belum ada jaminan bahwa opsi “penyelesaian” yang cepat melalui penggunaan kekuatan militer tidak akan diambil oleh pihak-pihak yang bertikai. Dalam hal ini, Cina kerap dilihat sebagai pihak yang memiliki kecenderungan untuk bergerak ke arah demikian dengan menggunakan kekerasan untuk mempertegas klaimnya di wilayah tersebut. Setelah apa yang ditunjukkan oleh Cina terhadap Taiwan bulan Maret 1996,³ tampaknya sulit bagi ASEAN untuk mengenyampingkan kemungkinan bahwa Cina juga bisa melakukan hal yang sama di *South China Sea (SCS)*. Kalau sebelumnya Cina hanya pernah mengambil tindakan keras terhadap Vietnam, insiden antara Cina dan Filipina awal tahun 1995 mengenai status Mischief Reef setidaknya menjadi catatan bahwa ada kemungkinan pemerintah Beijing sudah tidak ragu-ragu lagi untuk mendemonstrasikan kekuatan militernya terhadap negara pengklaim lainnya (*claimant*) yang berasal dari ASEAN. ASEAN menyadari kemungkinan demikian dan karenanya telah mengambil

³Saat ini, Cina melakukan serangkaian uji coba rudal di Selat Taiwan, yang dimaksudkan untuk menekan aspirasi sebagai elit dan masyarakat Taiwan yang menginginkan agar Taiwan menjadi sebuah negara independen.

langkah-langkah untuk menangani masalah tersebut, khususnya pada tingkat multilateral.

Misalnya, ASEAN telah mencoba membujuk Cina untuk menghormati *codes of conduct* ASEAN seperti *Zone of Peace, Freedom, and Neutrality* (ZOPFAN) and *Treaty of Amity and Co-operation* (TAC), sebagai nilai, norma, dan prinsip-prinsip yang harus menjadi acuan hubungan antarnegara di kawasan. Dalam pertemuan ASEAN *Ministerial Meeting* (AMM) bulan agustus 1995, para Menteri Luar Negeri ASEAN juga mengeluarkan Deklarasi *South China Sea* (SCS) yang menyerukan pihak-pihak yang terlibat untuk “menahan diri dari tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas di kawasan”⁴ Secara lebih khusus lagi, melalui prakarsa Indonesia, meskipun tidak formal, ASEAN mengajak Cina untuk ikut serta dalam forum dialog yang secara khusus mencari cara-cara positif untuk mengelola potensi konflik di *South China Sea* (SCS) ini.

Melalui upaya-upaya demikian, ASEAN jelas berharap untuk menciptakan tingkat kepastian tertentu (*a certain degree of predictability*) dalam perilaku setiap pihak yang bertikai. Namun, sikap dan respon Cina terhadap prakarsa-prakarsa ASEAN itu melahirkan berbagai kesulitan

⁴The Joint Communique of ASEAN Foreign Ministers, Brunai, August 1995.

bagi upaya ASEAN dalam menciptakan tata hubungan politik yang lebih *predictable* di kawasan.⁵

Dengan demikian, Konflik *South China Sea* (SCS) yang tidak hanya melibatkan Cina tetapi juga melibatkan empat negara-negara ASEAN (Vietnam, Philipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam) yang dimana negara-negara anggota ASEAN ini juga ikut mengklaim wilayah kedaulatannya atas kepulauan Spratly di *South China Sea* (SCS). Oleh karena itu konflik yang juga timbul di antara negara-negara ASEAN ini yang berdasarkan hukum internasional dan harus disepakati oleh semua pihak yang bertikai adalah bagaimana masalah sengketa *South China Sea* (SCS) yang terjadi diantara negara-negara ASEAN ini mampu mendapatkan solusi terbaik agar tidak menimbulkan potensi konflik militer antar negara kawasan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan tentang sengketa atas klaim dari Negara-negara kawasan beserta peranan Organisasi ASEAN untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah/skripsi yang berjudul ***“Penyelesaian Potensi Sengketa di Wilayah Perairan***

⁵Bantarto Bando, Ananta Gondomono, *ASEAN dan Tantangan satu Asia Tenggara*, (Jakarta: Centre For Strategic and International Studies, 1997), Hlm 132-134.

***South China Sea (SCS) Antar Negara-Negara Di Kawasan ASEAN
Dalam Perspektif Regionalisme”.***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyelesaian Potensi Sengketa di Wilayah Perairan *South China Sea* (SCS) dilihat dari perspektif hukum laut internasional ?
2. Bagaimana Peran Organisasi ASEAN itu sendiri dalam Menangani konflik sesama Negara ASEAN berkenaan dengan Potensi Sengketa di wilayah perairan *South China Sea* (SCS) ?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan di rumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian potensi sengketa di wilayah perairan *South China Sea* (SCS) dalam perspektif Hukum Laut Internasional.
2. Untuk mengetahui peran organisasi ASEAN dalam menangani konflik sesama negara ASEAN yang berkenaan dengan potensi sengketa di wilayah perairan *South China Sea* (SCS).

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sejarah Terbentuknya ASEAN

Organisasi internasional regional ASEAN (*Association of South East Asian Nations*) di dirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok (*Bangkok Declaration*), atau sering juga disebut *ASEAN Declaration*. Merupakan awal berdirinya ASEAN (*Association of South East Asian Nations*). Deklarasi tersebut menjadi penanda-penanda lahirnya sebuah organisasi antarnegara yang beranggotakan negara-negara di sebuah wilayah regional, Asia tenggara. Pembentukan organisasi tersebut dicetus oleh lima negara deklarator, yaitu: Indonesia, Thailand, Philipina, Malaysia dan Singapura. Keanggotaan ASEAN kemudian telah berkembang menjadi sepuluh negara anggota dengan masuknya Brunei Darusalam (1984), Vietnam (1995), Laos (1997), Myanmar (1997) dan Kamboja (1999).⁶

Sejarah berdirinya ASEAN tidak bisa dilepaskan oleh faktor sejarah, persamaan nasib dan kondisi geo-politik dunia pada saat itu. Adapun maksud dan tujuan yang pada dasarnya menjadi misi yang akan diperjuangkan oleh ASEAN adalah untuk menciptakan kawasan

⁶ Hilton Tarnama Putra Eka An Aqimuddin, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa ASEAN Lembaga dan Proses*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 25.

Asia Tenggara dalam suasana penuh rasa persahabatan, kedamaian dan kemakmuran. Negara-negara anggota ASEAN harus mengusahakan kemajuan dalam perekonomian dan pembangunan dalam semua sektor yang ada, meningkatkan pertahanan-keamanan nasional dan regional, serta menjaga kestabilan politik nasional maupun regional. Untuk mencapai misi tersebut, maka ASEAN didirikan dengan maksud dan tujuan, sebagaimana telah tertuang dalam Deklarasi Bangkok yang berbunyi sebagai berikut:

1. To accelerate the economic growth, social progress and cultural development in the region through joint endeavours in the *spirit of quality and partnership* in order to strengthen the foundation for a prosperous and peaceful community of South East Nation.
2. To promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in the relationship among countries of the region and adherence to the principles of the United Nation Charter.
3. To promote active collaboration and mutual assistance on matters of common interest in the economic, social, cultural, technical, scientific and administrative field.
4. To provide assistance to each other in the form of training and research facilities in the educational, professional, technical and administrative spheres.

5. To collaboration more effectively for the greater utilization of their agriculture and industries, the expansion of their trade including the study of the problems of international commodity trade, the improvement of their transportation and communication facilities and the raising of the living standards of their peoples.
6. To promote South East Asian Studies.
7. To maintain close and beneficial cooperation with existing international and regional organization with similar aims and purpose, and explore all avenues for even closer cooperation among themselves.⁷

Selanjutnya, dengan disahkannya keputusan untuk membentuk Sekretariat tetap ASEAN di Jakarta, maka ASEAN sekarang mempunyai wadah atau tempat untuk penumpahan kemauan politik dari masing-masing negara anggota, di mana Sekretariat merupakan sarana yang efektif untuk menggerakkan kerjasama ASEAN yang berisi dan kongkret di pelbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial-budaya dan lain-lain.

Pembinaan ASEAN sebagai suatu himpunan regional dapat direalisasikan dengan mengadakan “gerakan rakyat di kalangan

⁷ Syahmin AK, *Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional*, (Bandung: CV. ARMICO, 1988), hlm. 212.

masyarakat bangsa-bangsa ASEAN (*Movement of Southeast Asian Nation*) untuk menunjang pemerintah negara-negara ASEAN, agar lebih maju dalam melaksanakan dan menagani masalah-masalah ASEAN sendiri.⁸

Dengan demikian, dengan melihat sejarah pembentukan ASEAN. maka dapat pula dikatakan, menurut pendapat Mahkamah pada *Reparation Case* tahun 1949 yang menyatakan bahwa organisasi internasional merupakan subyek hukum internasional. Hukum internasional tidak secara defenitif menyebutkan kriteria sebuah organisasi internasional yang memenuhi syarat-syarat menjadi subyek hukum internasional. Dalam praktiknya tindakan organisasi internasional yang dapat dianggap memiliki kapasitas sebagai subyek hukum internasional harus memiliki ciri-ciri tertentu. Menurut Ian Brownlie ada 3 ciri yang harus dipenuhi oleh sebuah organisasi internasional, yaitu:

- 1) Adanya organisasi permanen yang terdiri dari negara-negara serta memiliki tujuan-tujuan dan dilengkapi dengan lembaga-lembaga.
- 2) Adanya pembedaan kekuasaan dan tujuan secara hukum antara organisasi dengan negara anggota.

⁸ *Ibid.*, hlm. 216.

- 3) Kekuasaan hukum tersebut dapat dilaksanakan dalam lingkup internasional dan tidak hanya berlaku pada sebuah negara atau negara-negara tertentu saja.

Sejak awal berdirinya ASEAN tahun 1967, banyak pihak yang meragukan status ASEAN sebagai organisasi internasional regional. Untuk memperkuat status organisasi, maka ASEAN mengadakan beberapa perubahan-perubahan organisasi. Bali Concord I tahun 1976 menjadi babak baru dalam perkembangan ASEAN. Perkembangan sangat berarti terjadi empat puluh tahun kemudian dengan berhasil membuat Piagam ASEAN.

Dalam hukum internasional bentuk piagam ini lebih memiliki kekuatan dibandingkan bentuk deklarasi. Kehendak inilah yang kemudian dicantumkan dalam pasal 3 Piagam ASEAN bahwa ASEAN merupakan organisasi antar negara yang memiliki personalitas hukum.⁹ Sementara itu pada awal bekerjanya ASEAN, terjadi berbagai cobaan yang cukup berat yang berasal dari masalah-masalah "*intra-regional*",¹⁰ yang sebagian besar telah berhasil diatasi dalam sidang para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-III tahun 1969 di Kuala Lumpur yang telah mencapai kata sepakat untuk penyelesaian pertikaian-

⁹ Hilton Ternama Putra Eka An Aqimudddin. *Op.cit*, hlm. 33

¹⁰ Persoalan-persoalan tentang "*intra-regional*" di maksud antara lain; Indonesia-singapura mengenai masalah hukuman mati terhadap dua orang Marinir Indonesia di Singapura; Philipina-Malaysia masalah Sebah; Malaysia-Thailand masalah Tapal batas kedua negara; Indonesia-Philipina masalah pulau miangas (kini berhasil diselesaikan melalui Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Philipina).

pertikaian antar negara-negara anggota secara musyawarah dan mufakat.

Dengan demikian kemampuan ASEAN untuk memelihara keamanan dan perdamaian di kawasan masih berlanjut hingga kini. Permasalahan yang juga timbul di kawasan ini yaitu permasalahan Batas Laut Antarnegara ASEAN. Dalam hal ini *South China Sea* (SCS), yang juga menjadi sumber kehidupan bagi orang-orang yang berdiam disekitarnya, tetapi pada lain pihak merupakan sumber persengketaan. Semua negara Asia Tenggara berbatasan dengan *South China Sea* (SCS), kecuali Laos, dan sebagai akibat timbullah berbagai macam masalah, seperti klaim terhadap pulau-pulau yang dipersengketakan dan masalah lalu lintas di antara negara-negara yang berbatasan dengannya. *South China Sea* (SCS) merupakan “Laut setengah tertutup” dalam arti Konvensi Hukum Laut 1982.¹¹

Sejumlah masalah dan controversial telah muncul yang mempengaruhi hubungan antara negara-negara ASEAN, yang semuanya berbatasan dengan *South China Sea* (SCS) karena tidak saja akan mempengaruhi hubungan ASEAN dengan Cina di masa

¹¹ C.P.F. Luhulima, *ASEAN Menuju Postur Baru*, (Jakarta: Centre For Strategic and International Studies (CSIS), 1997), hlm. 281.

mendatang, tetapi juga ikut menentukan masa depan peranan ASEAN dalam Forum Regional ASEAN (ARF).¹²

2.2. Basic Instrument Hukum Laut

Hukum laut diawali dengan pembahasan mengenai pelbagai fungsi laut bagi umat manusia. Dalam sejarah, laut terbukti telah mempunyai pelbagai fungsi, antara lain sebagai: 1) sumber makanan bagi umat manusia; 2) jalan raya perdagangan; 3) sarana untuk penaklukan; 4) lokasi yang dapat digunakan untuk melakukan pertempuran-pertempuran; 5) sarana rekreasi; dan 6) alat pemisah atau pemersatu bangsa. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), maka fungsi laut telah bertambah lagi dengan ditemukannya bahan-bahan tambang dan galian yang berharga di dasar laut dan usaha-usaha mengambil sumber daya alam.¹³

Bertitik tolak dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa laut dapat digunakan oleh umat manusia sebagai sumber daya alam bagi penghidupannya, jalur pelayaran, kepentingan pertahanan dan keamanan dan pelbagai kepentingan lainnya. Fungsi-fungsi laut yang

¹² Bantarto Bandoro Ananta Gondomono, *ASEAN dan Tantangan Satu Asia Tenggara*, (Jakarta: Centre For Strategic and Internasional Studies, 1997), hlm.131.

¹³ Hasyim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Penerbit Binacipta, Jakarta, 1979, Hlm. 1.

disebutkan di atas telah dirasakan oleh umat manusia, dan telah memberikan dorongan terhadap penguasaan dan pemanfaatan laut oleh masing-masing negara atau kerajaan yang didasarkan atas suatu konsepsi hukum.

Pentingnya laut dalam hubungan antarbangsa menyebabkan pentingnya pula arti hukum laut internasional. Tujuan hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap dari laut, yaitu sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan serta sebagai sumber tenaga. Karena laut hanya dapat dimanfaatkan dengan kendaraan-kendaraan khusus, yaitu kapal-kapal, hukum laut pun harus menetapkan pula status kapal-kapal tersebut. Di samping itu, hukum laut juga harus mengatur kompetisi antara negara-negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan yang diberikan laut, terutama sekali antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang.

2.2.1. Konvensi Hukum Laut 1982

Bila dulu hukum laut pada pokoknya hanya mengurus kegiatan-kegiatan di atas permukaan laut, tetapi dewasa ini perhatian juga telah diarahkan pada dasar laut dan kekayaan mineral yang terkandung di dalamnya. Hukum laut yang dulunya bersifat *unidimensional* sekarang berubah menjadi *pluridimensional*

yang sekaligus merombak filosofi dan konsepsi hukum laut di masa lalu. Justru untuk dapat menggunakan kekayaan-kekayaan laut itulah, hukum laut semenjak beberapa dekade terakhir telah berupaya keras bukan saja untuk menentukan sampai berapa jauh kekuasaan suatu Negara terhadap laut yang menggenangi pantainya, sampai sejauhmana negara-negara pantai dapat mengambil kekayaan-kekayaan yang terdapat di dasar laut dan laut di atasnya, tetapi juga untuk mengatur eksploitasi daerah-daerah dasar laut yang telah dinyatakan sebagai warisan bersama umat manusia.¹⁴

The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), juga disebut Konvensi Hukum Laut atau Hukum perjanjian Laut, adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari ketiga Konferensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS III), yang berlangsung dari tahun 1973 sampai 1982. United Nations Convention on the Law of the Sea mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia, menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. UNCLOS mulai berlaku pada tahun 1994, setahun setelah Guyana menjadi negara ke-60 menandatangani

¹⁴ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: P.T.Alumni, 2011), hlm. 304.

perjanjian. Untuk saat ini, 161 negara dan masyarakat Eropa telah bergabung dalam Konvensi (UNCLOS). Sedangkan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima instrumen ratifikasi dan akses.

PBB menyediakan dukungan untuk pertemuan pihak negara untuk Konvensi, PBB tidak memiliki peran operasional langsung dalam pelaksanaan Konvensi. Bagaimanapun, yang berperan adalah organisasi-organisasi seperti Organisasi Maritim Internasional (*International Maritime Organization*), Komisi Penangkapan Ikan Paus Internasional (*The International Whaling Commission*), dan Otoritas Dasar Laut Internasional (*International Seabed Authority*, yang terakhir dibentuk oleh Konvensi PBB). UNCLOS menggantikan konsep *freedom of seas* yang tua dan lemah, berasal dari abad ke-17, hak nasional terbatas pada sabuk tertentu air yang membentang dari garis pantai suatu negara, biasanya tiga mil laut, sesuai dengan aturan 'tembakan meriam' dikembangkan oleh para ahli hukum Belanda *Cornelius Van Bynkershoek*. Semua perairan di luar batas-batas nasional dianggap perairan internasional untuk semua bangsa, dan tidak

menjadi milik satupun dari mereka (prinsip liberum kuda diumumkan oleh Grotius).¹⁵

Konferensi PBB I tentang Hukum Laut tahun 1958 di Jenewa, *United Nations Conference on the Law of the Sea (UNCLOS I)* berhasil menelorkan 4 Konvensi, tetapi masih banyak lagi masalah yang belum diselesaikan, sedangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat. Konvensi-konvensi tahun 1986 bukan saja belum mengatur semua persoalan, tetapi ketentuan-ketentuan yang adapun dalam waktu yang pendek tidak lagi memadai dan telah ditinggalkan perkembangan teknologi.

Di samping itu, Negara-negara yang lahir sesudah tahun 1958 yang jumlahnya tidak sedikit dan yang tidak ikut merumuskan Konvensi-konvensi tersebut menuntut agar dibuatnya ketentuan-ketentuan baru dan mengubah ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai. Demikianlah, untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang ada dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi dan menampung masalah-masalah yang datang kemudian, Majelis Umum PBB pada tahun 1976 membentuk suatu badan yang bernama *United Nations Seabed Committee*. Sidang-sidang Komite

¹⁵<http://www.scribd.com/doc/114966544/UNCLOS-1982>., di akses pukul 23:44, 2 november 2013.

ini kemudian dilanjutkan dengan konferensi Hukum Laut III (UNCLOC III) yang sidang pertamanya diadakan di New York bulan September tahun 1973 dan yang 9 tahun kemudian berakhir dengan penandatanganan Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica.¹⁶

Berdasarkan rezim-rezim hukum laut internasional mengenai zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, laut lepas, dan hak pemanfaatan sumber daya alam mineral yang terkandung di kawasan dasar laut internasional, maka dengan demikian penulis akan membicarakan ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 yang berkaitan dengan kedaulatan negara pantai atas laut teritorial yang membahas beberapa ketentuan yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 yang berkaitan dengan *Kedaulatan Negara Pantai atas Laut Teritorial*.
2. Ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 Mengenai *Cara-cara Penarikan Garis Pangkal dalam Menetapkan Lebar Laut Teritorial Suatu Negara Pantai*.

¹⁶ Boer Mauna, *op.cit.*, hlm. 305.

3. Ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 yang Berlaku bagi semua Kapal-kapal Asing.
4. Ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 yang Berlaku bagi *Kapal-kapal Niaga dan Kapal-kapal Pemerintah yang Dipergunakan untuk Maksud-maksud Perniagaan*.¹⁷

2.2.2. Pengaturan Mengenai Perairan Nasional di Masing-masing Negara Wilayah ASEAN yang Bersengketa di *South China Sea* (SCS)

2.2.2.1. Pengertian Regionalisme

Dalam dunia globalisasi, proses multilateral membentuk relevansi interaksi antara negara-negara dan subjek-subjek hukum internasional, mengurus berbagai macam hubungan negara-negara adalah tantangan yang besar, sehingga menjadi faktor pendorong berbagai negara untuk mempersempit kerangka dimana mereka merasa lebih teratur, lebih teratur dengan tujuan untuk mengejar kepentingan. Dengan meletakkan regionalisme ke dalam konteks, kita harus membedakan antara regionalisme jaman dulu “Old Regionalism” yang muncul di masa pasca perang dunia kedua,

¹⁷ Didik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 21.

dan regionalisme yang baru “New Regionalism” yang ada di masa kini. Perkembangan pada masa pasca perang dunia II telah melihat pengangkatan regionalisme yang tidak hanya berhubungan tentang politik dan keamanan lagi, tapi juga termasuk banyak dimensi. Hal ini telah bertumbuh dari integrasi sosial dengan sebuah wilayah dan sering mencerminkan interaksi sosial dan ekonomi antara negara-negara yang secara geografis terhubung.

Joseph Nye menyebutkan wilayah internasional “sebagai batas angka negara yang terhubung oleh sebuah hubungan geografis dan tingkatan ketergantungan.” Joseph Nye selanjutnya menegaskan bahwa regionalisme adalah formasi asosiasi antarnegara atau pengelompokkan pada basis wilayah. Regionalisme yang kita alami sekarang, dikendalikan oleh interaksi negara dan aktor non-negara seperti korporasi multinasional, organisasi non-organisasi dan bermacam aktor internasional dalam mengejar kepentingan nasional dan domestik.

Dapat kita lihat ASEAN menjadi konsentrasi utama kebijakan luar negeri Indonesia. Kita telah mengikuti dengan seksama pada perkembangan pesat yang dicapai ASEAN

sejak berdirinya oleh deklarasi Bangkok pada tahun 1967. ASEAN telah berubah dari asosiasi yang longgar menjadi sebuah dasar aturan dan organisasi yang berpusat pada masyarakat oleh pembuatan ASEAN Charter di tahun 2008. Itu yang membuat ASEAN mendapatkan legalitas personal selama 41 tahun. Dengan demikian, kontribusi utama ASEAN ke dunia sejak berdirinya adalah pencapaiannya dalam mengurus kedamaian dan keseimbangan regional yang menjadi bukti saat ini.

Forum-forum dan mekanisme-mekanisme yang diprakarsai ASEAN mendapat pengakuan internasional dan menyediakan podium penting untuk dialog dan konsultasi untuk mengatur perdamaian dan keseimbangan regional. Prinsip tidak campur tangan dan prinsip penghargaan integritas wilayah antara anggota-anggotanya, dan juga mekanisme pemecahan masalah melalui konsensus atau yang dikenal sebagai “the ASEAN way” yang menjadi karakteristik kunci yang membentuk ASEAN menjadi organisasi regional saat ini.¹⁸

¹⁸ H.E. Andri Hadi, (Ambassador of the Republic of Indonesia to the Republic of Singapore), *Regionalism, Free Trade, and Human Right Protection*, Delivered as a keynote address at the Padjadjaran International Legal Conference (PLIC) Series 2013, Bandung, 22 Oktober 2013.

2.2.2.2. Vietnam

Pada Potensi sengketa di wilayah perairan *South China Sea (SCS)*, Vietnam merupakan bagian dari negara Asia Tenggara yang ikut menjadi negara pengklaim atas masalah di *South China Sea (SCS)*. Klaim Vietnam didasarkan pada latar belakang sejarah perancis tahun 1930-an masih menjajah Vietnam. Pada saat itu kepulauan Spratly dan Paracel dibawah control Perancis. Setelah merdeka dari Perancis, Vietnam kemudian mengklaim kedua pulau tersebut, serta memakai argument dasar landas kontinen. Vietnam mengklaim kepulauan Spratly sebagai daerah lepas pantai provinsi Khanh Hoa. Klaim Vietnam mencakup area yang cukup luas di *South China Sea (SCS)* dan Vietnam telah menduduki sebagian kepulauan Paracel sebagai wilayahnya.

2.2.2.3. Philipina

Adapun negara anggota ASEAN yang menjadi negara pengklaim atas potensi sengketa di wilayah perairan *South China Sea (SCS)* yaitu Philipina. Philipina juga mengklaim kepulauan Spratly berdasarkan pada prinsip landas kontinen serta eksplorasi Spartly oleh seorang penjelajah Philipina pada

tahun 1956, menurut data pejelajah Philipina bahwa pulau-pulau yang diklaim adalah: 1) bukan bagian dari Kepulauan Spartly, dan 2) tidak dimiliki oleh negara manapun serta terbuka untuk diklaim. Tahun 1971, Philipina secara resmi menyatakan 8 pulau di Spartly sebagai dari provinsi Palawan. Ada 8 pulau yang diklaim dan dikuasai Philipina di Spartly, luas total lahan pulau-pulau ini adalah 790.000 meter persegi.

2.2.2.4. Malaysia

Negara yang juga mengklaim sebagian dari kepulauan di wilayah perairan *South China Sea (SCS)* adalah bagian dari kepulauannya adalah Malaysia. Klaim Malaysia berdasarkan pada prinsip landas kontinen, berkaitan dengan hal itu Malaysia telah membuat batas yang diklaimnya dengan koordinat yang jelas. Malaysia telah menempati tiga pulau yang dianggap berada dalam landas kontinennya. Malaysia telah mencoba untuk membangun garis antara pulau dengan menggunakan pasir dan tanah.

2.2.2.5. Brunei Darussalam

Negara pengklaim selanjutnya yaitu Brunei Darussalam yang juga menjadi salah satu anggota ASEAN yang ke-6 pada

awal tahun 1984. Dalam hal ini Brunei tidak mengklaim pulau-pulau, tetapi mengklaim bagian dari landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Brunei mengumumkan ZEE yang meliputi Loiusa Reef di Kepulauan Spartly.¹⁹ Di Asia Tenggara Brunei terletak pada suatu titik pusat. Di sebelah Utara Brunei terbentang *South China Sea (SCS)* yang kemudian disambung oleh daratan Indocina, di sebelah Barat terbentang Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Muangthai. Di sebelah Timur terpapar wilayah Malaysia, Indonesia, dan Philipina, dan di sebelah Selatan wilayahnya dikelilingi oleh Malaysia dan Indonesia. Ini adalah kedudukan yang menyolok bagi Brunei, yang menghadap ke *South China Sea (SCS)* yang ramai dengan lalu lintas laut, baik untuk armada dagang maupun militer. Brunei memiliki pelabuhan laut yang relatif paling baik di wilayah *South China Sea (SCS)*.²⁰

2.3. Instrumen Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa Melalui Organisasi Internasional yaitu;

2.3.1. Organisasi Regional

¹⁹ www.lemhannas.go.id/.../1960_tannas%20karmin%20... di akses Pukul 23:47, 2 November 2013

²⁰ Syahmin, *Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional*, (Bandung: CV. Armico, 1988), hlm. 260.

Dalam Deklarasi Manila tahun 1982, tentang penyelesaian sengketa secara damai dinyatakan terdapatnya penyelesaian melalui organisasi regional. Organisasi yang dimaksud diantaranya adalah *The Organization of African Unity* (OAU), NATO, dan EEC. Salah satu fungsi utama organisasi regional tersebut adalah menyediakan wadah yang terstruktur bagi pemerintah-pemerintah untuk melakukan hubungan-hubungan diplomatik. Tentu saja, penyelesaian sengketa-sengketa akan menjadi lebih mudah mengidentifikasi persoalannya sebelum mencapai tahap yang lebih gawat.

Pada umumnya organisasi regional memiliki fungsi sebagai *good offices* dan mediasi. Sebagai contoh Organisasi Persatuan Afrika dan Uni Eropa sering memberikan pelayanannya untuk menyediakan jasa bagi penyelesaian sengketa. OAU sering berperan sebagai pembantu bagi negara-negara Afrika dalam penyelesaian sengketanya. Sedangkan EU melakukan mediasi terhadap negara-negara eks Yugoslavia.

Di samping metode mediasi dan negosiasi organisasi regional pun menggunakan metode lain. *Inquiry* dan konsiliasi merupakan metode alternatif bagi organisasi regional untuk menyelesaikan persoalan sengketa. Kedua proses ini

sebagaimana telah diterangkan di atas melibatkan pencarian fakta yang pada umumnya dilakukan oleh individu ataupun kelompok atau sebuah komisi. Pada tahun 1992, *the Conference of American State* membentuk komisi yang *the Chaco Commission* untuk melakukan investigasi atas sengketa antara Bolivia dan Paraguay.

Tidak kalah pentingnya adalah Liga Arab yang didirikan pada tahun 1945 dan dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama antar negara-negara Arab. Namun, meskipun mekanisme bagi penyelesaian sengketa sebagaimana mekanisme HAM-nya tidak memiliki kejelasan, kontribusi yang paling signifikan dari Liga Arab adalah pembentukan Pasukan Inter-Arab pada tahun 1961. Berbeda dengan *the Organization of American States* (OAU) yang didirikan pada tahun 1948. Mekanisme penyelesaian sengketa yang termuat dalam *the Pact of Bogota* 1948 cukup jelas oleh karena pakta tersebut memuat ketentuan-ketentuan mengenai model-model penyelesaian sengketa seperti mediasi, *Inquiry*, dan penyelesaian yudisial.

2.3.2. PBB

Sebagaimana amanat yang dinyatakan dalam Pasal 1 Piagam PBB, salah satu tujuannya, adalah untuk

mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Tujuan tersebut sangat terkait erat dengan upaya penyelesaian sengketa secara damai. Karena tidak mungkin perdamaian dapat tercipta apabila sengketa antar negara tidak dapat terselesaikan. Sehingga tepatlah kiranya apabila kita katakan sebuah mekanisme bagi penyelesaian sengketa merupakan hal yang terpenting bagi pencapaian tujuan dari PBB.

Isi Piagam PBB tersebut di antaranya memberikan peran penting kepada ICJ (The International Court of Justice), dan dalam upaya penegakannya diserahkan pada Dewan Keamanan. Berdasar pada Bab VII DK dapat mengambil tindakan-tindakan yang terkait dengan penjagaan atas perdamaian. Sedangkan dalam dalam Bab VI, Dewan keamanan juga diberikan kewenangan untuk melakukan upaya-upaya yang terkait dengan penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 35 DK diberikan kewenangan untuk memutus sengketa yang dibawa oleh negara anggota atau bukan kepadanya. Kemudian oleh Pasal berikutnya DK dapat memberikan rekomendasi atas persengketaan yang dapat mengancam perdamaian. Namun, Pasal 33 mengamanahkan agar para pihak sebelumnya dapat mungkin menggunakan negosiasi atau cara-cara damai lainnya yang mereka sepakati.

Di samping Dewan Keamanan, terdapat Majelis Umum yang memegang peran dalam manajemen pemecahan sengketa dalam sistem PBB. Sebagai contoh adalah diberikannya Majelis Umum kewenangan untuk melakukan studi dan memberikan rekomendasi dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional. Dalam Pasal 14 Majelis Umum diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi secara luas atas segala persoalan yang dianggap dapat membahayakan perdamaian.

Sedangkan institusi PBB yang lain sangat penting dalam menyelesaikan pertikaian secara damai adalah Sekretaris Jenderal PBB. Berdasarkan Pasal 99 sekjen memiliki kewenangan untuk memberikan saran kepada Dewan Keamanan mengenai apa-apa yang menjadi ancaman terhadap perdamaian. Dalam praktek sekjen memiliki peran yang cukup luar biasa dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam menyediakan *good office* dan mediasi. Dalam hal ini Sekjen bersikap sebagai pihak netral yang didukung oleh Dewan Keamanan atau pun Majelis Umum.²¹

²¹ Jahawir Thontowi & Pranoto Iskandar, *Hukum Kontemporer Internasional*, (Yogyakarta: PT. Refika Aditama, 2006), Hlm. 236-238.

2.4. Penyelesaian Sengketa Di Tingkat Regional

Pada poin-poin sebelumnya telah dijelaskan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Selanjutnya, pada poin ini akan dibahas lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa ditingkat Regional yang dalam hal ini berkaitan dengan Asia Tenggara pada wilayah keamanan. Berikut yang menjadi Pengikraran Asia Tenggara sebagai zona damai itu kemudian berhasil diikuti oleh perumusan 14 pedoman pengusahaannya, yang ditandatangani para menteri luar negeri ASEAN di bulan April 1972, dan selengkapnya dikutip disini yaitu:

- 1. Observance of the Charter of the United Nation, the Declaration on the Promotion of the World Peace and Cooperation of the Bandung Declaration of 1955, The Bangkok Declaration of 1967 and the Kuala Lumpur Declaration of 1971.*
- 2. Mutual respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity and national identity of all nation within and without the region.*
- 3. The right of every state to lead itsnational existence freefrom external interference, subversion or coercion.*
- 4. Non-interference in the internal affair of zonal states.*

5. *Refraining from inviting or giving consent to intervention by external power in domestic or regional affairs of zonal states.*
6. *Settlement of differences or disputes by peaceful means in accordance with the Charter of the United Nation.*
7. *Renunciation of the threat, or use of force in the conduct of international relations.*
8. *Refraining from the use of armed force for any purpose in the conduct of international relations except for individual or collective self-defence in accordance with the Charter of the United Nations.*
9. *Abstention from involvement in any conflict of power outside the zone from entering into any agreement which would be inconsistent with the objectives of the zone.*
10. *The absence of foreign military bases in the territories of zonal states.*
11. *Prohibition of the use, storage, passage or testing of nuclear weapons and their components within the zone.*
12. *The right to trade freely with any country or international agency irrespective of difference in socio-political systems*
13. *The right to receive aid and freely for the purpose of strengthening national resilience expect when the aid is*

subject to conditions inconsistent with the objectives the zone.

14. Effective regional corporation among the zona states.

Pada pedoman-pedoman ini memberikan batasan yang amat tegas bagi kehidupan antarnegara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN yang dituangkan dalam *Perjanjian Persahabatan dan Kerja sama di Asia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation/TAC)*. Regionalisme Asia Tenggara tidak boleh mengganggu “kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, keutuhan wilayah dan kepribadian nasional” setiap bangsa, bahwa setiap negara harus dapat melangsungkan kehidupan nasionalnya bebas dari campur tangan, subversi atau tekanan dari luar. Bahwa tidak ada campur tangan mengenai urusan dalam negeri satu sama lain, bahwa setiap perselisihan atau persengketaan harus diselesaikan dengan cara-cara damai, dan bahwa setiap pengancaman dengan kekerasan atau penggunaan kekerasan tidaklah dapat diterima.²²

²² C.P.F. Luhulima, *ASEAN Menuju Postur Baru*, (Jakarta: Centre For Strategic and International Studies, 1997), hlm. 303.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai konvensi-konvensi hukum internasional yang membahas suatu permasalahan hukum internasional dalam suatu negara. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang ditujukan untuk; Pertama, memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang diperlukan dan relevan dengan penelitian, yang bersumber dari buku-buku, media pemberitaan, jurnal, serta sumber-sumber informasi lainnya seperti data yang terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang relevan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara yang dilakukan langsung dengan pihak-pihak yang dianggap berkompeten dalam penyusunan skripsi ini. Kedua, Data yang diperoleh dari para ahli hukum seperti hakim atau pengacara maupun akademisi baik yang didapatkan dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, maupun publikasi resmi dari ASEAN dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Data ini kemudian digunakan sebagai data pendukung dalam menganalisis penyelesaian Potensi sengketa di wilayah perairan *South China Sea (SCS)*. Teknik

pengumpulan data ini juga digunakan untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori, dan konsep yang relevan dalam penelitian ini, yaitu mengenai berbagai isu tentang *South China Sea* (SCS), peran Organisasi ASEAN dalam menjaga, kemajuan dan penghormatan antarnegara anggota ASEAN, dan perkembangan hubungan kerjasama serta penyelesaian sengketa di wilayah perairan *South China Sea* (SCS).

3.2. Lokasi Penelitian

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akan memilih lima lokasi penelitian, yaitu:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Perpustakaan Umum Universitas Hasanuddin.
3. Direktorat Politik Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri Indonesia.
4. *Headquarter* ASEAN.

3.3. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan menjadi sumber informasi yang digunakan oleh Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah:

1. Hasil wawancara langsung yang berhubungan dengan judul skripsi ini.
2. Buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

3. Berbagai literatur yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Seperti; jurnal, hasil penelitian, maupun sumber informasi lainnya baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy* yang didapatkan secara langsung maupun hasil penelusuran dari internet.

3.4. Analisis Data

Berdasarkan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh, penulis kemudian membandingkan data tersebut. Penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dalam menganalisis data yang ada untuk menghasilkan kesimpulan dan saran. Data tersebut kemudian dituliskan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1. UNCLOS sebagai landasan Hukum Internasional dalam penyelesaian sengketa wilayah

Permasalahan *South China Sea (SCS)* dilatarbelakangi oleh tiga faktor penting yaitu, ekonomi, *strategic*, dan politik. Ketiga faktor tersebut merupakan motif utama bagi *claimant state* (negara penuntut) untuk mempertahankan haknya di wilayah perairan *South China Sea (SCS)*. Yang menjadi objek sengketa para pihak di *South China Sea (SCS)* terfokus pada dua pulau utama, yaitu Spratly dan Paracel. Negara-negara yang menjadi *claimant states* untuk pulau Spratly adalah Brunei, China, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam. Dua negara terakhir juga menuntut kepemilikan akan Paracel yang berada di bawah kontrol China sejak tahun 1974.

Penetapan batas-batas antar negara merupakan suatu hal yang bersifat konfliktual karena menyangkut masalah kedaulatan suatu negara. Maka, tidak heran dengan banyaknya masalah-masalah yang timbul karena batas teritorial di dunia internasional sampai saat ini. Perbedaan pandangan dalam menentukan batas-batas negara dan sulitnya penentuan batas teritorial di laut menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Begitu pun yang terjadi di Kawasan Asia Tenggara, khususnya yang terjadi di wilayah perairan *South China Sea (SCS)*.

Awal mula dari sengketa di *South China Sea (SCS)* ini adalah pada saat Cina mengumumkan peta wilayah kedaulatannya termasuk kepulauan-kepulauan beserta gugusannya yang secara de jure belum jelas kepemilikannya. Sengketa ini semakin memanas dengan adanya cadangan minyak dan hidrokarbon di wilayah ini serta berkembangnya hukum internasional mengenai laut United Nations on the Law of the Sea (UNCLOS) pada tahun 1982.²³

Demikian pula sikap negara-negara yang merujuk pada Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS) sebagai dasar penyelesaian masalah sengketa kedaulatan atas *Spartly*. Konvensi ini tidak dapat dijadikan dasar bagi penyelesaian sengketa kedaulatan atas daratan baik benua maupun pulau-pulau. sementara tuntutan Brunei dan Malaysia dapat dianggap sebagai bagian dari kecenderungan perluasan yurisdiksi atas laut dan pemagaran (*france off*) samudera dan dapat diselesaikan dengan UNCLOS 1982, tuntutan Cina dan Vietnam lebih didasarkan sejarah. Oleh karena itu UNCLOS 1982 tidak dapat menyelesaikan masalah pemilikan berdasarkan sejarah.

Cina, menuntut seluruh kawasan *South China Sea (SCS)* yang dikelilingi oleh 9 garis-garis terputus yang tidak jelas koordinatnya yang dikemukakan pada tahun 1947. Dalam UNCLOS 1982 tidak terdapat

²³ Asnani Usman & Rizal Sukma, *Konflik Laut Cina Selatan Tantangan Bagi ASEAN*, (Jakarta: Centre For Strategic and International Studies, 1997), hlm. 58-59.

ketentuan yang membenarkan tuntutan Cina, kalau garis-garis yang terputus itu diartikan sebagai garis-garis batas laut teritorial.

Demikian pula jika dilihat dari UU tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan yang dikeluarkan Cina pada tahun 1992, konsep *adjacent sea* tidak jelas didefinisikan sehingga sulit dimengerti dalam arti hukum. Dalam UNCLOS 1982 tidak terdapat konsep yang dikemukakan oleh Cina, karena Konvensi ini hanya merumuskan pasal-pasal mengenai perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, laut tertutup dan laut setengah tertutup dan laut lepas. Pengukuran semua ketentuan ini dimulai dari titik pangkal, dan tidak dari dalam laut. Tuntutan kedaulatan atas pulau-pulau itu menjadi jelas ketika pada tahun 1995, Cina mengemukakan bahwa negara ini tidak lagi menuntut seluruh perairan kawasan *South China Sea* (SCS), tetapi pulau-pulau Spratly dan Paracel yang terletak di dalam garis-garis yang terputus.

Tetapi pada tahun 1996 Cina mengambil sikap yang dianggap bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Pada tanggal 15 Mei 1996 Cina telah mensahkan Undang-undang batas perairan teritorialnya yang ditarik dari garis pantai di sepanjang daratan Cina dan kepulauan Paracel. Penerapan perundang-undangan mengenai perairan teritorial yang bertentangan dengan UNCLOS 1982 seperti yang

dilakukan Cina dapat menghambat penyelesaian sengketa Spratly karena akan ditentang oleh negara-negara bersengketa lainnya.²⁴

Sejak adanya hukum laut internasional pada tahun 1970an dan UNCLOS pada tahun 1982, maka semua yang menyangkut laut dan batas-batas negara yang berada di laut diatur dalam hukum tersebut. Dalam UNCLOS 1982 disebutkan bahwa batas laut territorial adalah 12 mil dari garis pantai paling luar untuk menjaga kedaulatan dan keamanan, landas kontinen untuk eksplorasi sumber daya mineral, dan ZEE untuk eksplorasi serta eksploitasi sumber daya hayati. Dengan adanya aturan dalam hukum laut internasional tersebut, negara-negara yang berbatasan dengan *South China Sea (SCS)* menjadi terpacu dan menyadari betapa pentingnya kawasan tersebut dalam bidang pelayaran, sumber daya alam, sumber daya mineral dan segala apapun yang terkandung di dalamnya.

Perbedaan prinsip dan segala sesuatu yang dapat menimbulkan konflik diatur dalam UNCLOS 1982 dengan mengharuskan pihak-pihak yang bersengketa berunding antar negara untuk mencapai kesepakatan dan keadilan tanpa adanya konflik. Namun, hal tersebut menjadikan negara-negara yang bersengketa untuk mengedepankan national interest masing-masing negara.

²⁴ *ibid.*, 60.

Jika kita melihat dari segi hukum internasional, khususnya dari *United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS)* tahun 1982 yang konten utamanya mencakup mengenai batas maritim dan pemberian hak atas kekayaan laut, maka ketiga aspek penting di atas menjadi sangat realistis. Ketika sebuah negara memiliki batas wilayah darat tertentu yang berbatasan dengan laut, maka kepemilikan tersebut akan berimplikasi pada kepemilikan wilayah laut.

Seperti kita ketahui bahwa sebuah negara dapat menikmati zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang dihitung 200 *nautical mile* (nm) dari *baseline*. Negara diberikan hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi *living* dan *non-living resources* atas laut di daerah ZEE. Sedangkan hak atas *continental shelf* (landas kontingen) yang dapat dihitung hingga 350nm dari *territorial baseline* memberikan kebebasan kepada negara untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi *non-living resources*. Ketentuan hukum internasional ini jelas memberi dampak ekonomis, *strategic*, serta politik bagi *claimant states* yang akan di *back-up* secara hukum jika ingin mengeksplorasi dan mengeksploitasi ZEE dan *continental shelf* di daerah *South China Sea (SCS)*, tentu setelah memperoleh kepemilikan.

Terdapat enam negara yang mengklaim kepemilikan atas Kepulauan Spratly yaitu Cina, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, Taiwan dan Malaysia. Berdasarkan hukum laut ZEE, dari ke enam negara

tersebut sebenarnya hanya Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina yang berhak atas kepemilikan dan pengelolaan kepulauan Spratly, karena hanya ketiga negara tersebut yang Zona Ekonomi Eksklusifnya mencapai Kepulauan Spratly. Status kepemilikan kepulauan tersebut tidak terlepas dari hukum atau peraturan yang ada mengenai kelautan.

Ahli kelautan Hugo De Groot pada tahun 1609 memperkenalkan azas kelautan yang kemudian dikenal dengan azas laut bebas (*mare liberum*) yang menyatakan bahwa keberadaan laut bebas berhak untuk dieksploitasi oleh siapa saja tetapi tidak dapat dimiliki oleh siapapun juga. Kemudian atas dasar inilah, Kepulauan Spratly tidak dibenarkan untuk dimiliki oleh negara manapun, karena akan bertentangan dengan azas laut bebas tersebut. Namun seratus tahun kemudian, muncullah azas baru yang kemudian dikenal dengan azas laut tertutup (*mare clausum*) yang menyatakan bahwa laut dapat dikuasai oleh suatu bangsa dan negara saja pada periode tertentu.

Secara umum, Kepulauan Spratly memang rawan memiliki potensi untuk terjadinya konflik terutama disebabkan oleh beberapa hal berikut; tempat yang strategis yang dan menyangkut kepentingan beberapa negara, konfrontasi sejarah yang panjang antar negara-negara pengklaim, adanya beberapa klaim kepemilikan yang tumpang tindih, dan perebutan sumber daya alam serta konflik yang paling dominan adalah terjadinya bentrokan senjata antara Cina dan Vietnam pada tahun 1988. Inti

permasalahannya adalah adanya ketidakpastian hak kepemilikan atas pulau-pulau dan perairan di sekeliling wilayah kepulauan Spratly.²⁵

Sudut Pandang Hukum Internasional atas Kepulauan Spratly (Sudut pandang PBB) Jika dilihat dari sudut pandang hukum internasional atas kepulauan Spratly, maka kita bisa mengacu kepada hukum laut internasional PBB, yaitu UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) 1982. Ada beberapa pasal yang terdapat dalam hukum UNCLOS yang berkaitan dengan klaim kepemilikan kepulauan Spratly di wilayah perairan *South China Sea (SCS)*, yaitu :

1. Pasal 15 UNCLOS 1982 mengenai garis tengah dalam penetapan batas dua negara pantai

“Untuk menentukan garis tengah wilayah laut dua negara yang berhadapan atau bersebelahan, maka diukur dari jarak tengah dari masing-masing titik terdekat garis pantai masing-masing negara...”

2. Pasal 76 UNCLOS 1982 mengenai Landas Kontinen

“Batas terluar landas kontinen suatu negara pantai dinyatakan sampai kedalaman 200 mil laut atau di luar batas itu sampai kedalaman air

²⁵ <http://irjournal.webs.com/apps/blog/show/4113964> Di akses Pukul 19:25, tanggal 10 Februari 2014.

yang memungkinkan dilakukannya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam”

3. Pasal 122 UNCLOS 1982 mengenai Laut Setengah Tertutup

“Laut Tertutup atau Setengah Tertutup yang berarti suatu daerah laut yang dikelilingi oleh dua atau lebih negara dan dihubungkan dengan laut lainnya atau samudera, oleh suatu alur laut yang sempit atau terdiri seluruhnya atau dari laut territorial dan Zona Ekonomi Eksklusif dua atau lebih negara pantai.”

4. Pasal 289 UNCLOS 1982 mengenai penentuan penetapan batas wilayah

“Penetapan batas wilayah sebaiknya dengan melakukan perjanjian internasional yang disepakati negara-negara, dan penggunaan hak sejarah dapat digunakan asalkan tidak mendapat pertentangan dari negara lain . . .”

5. Pasal 279, 280, 283, dan 287 UNCLOS 1982 mengenai penyelesaian sengketa

Pasal-pasal tersebut diatas menjelaskan mengenai kewajiban dari setiap pihak yang bertikai untuk menyelesaikan sengketa dengan cara-cara yang damai.

4.2. Peran Organisasi ASEAN dalam Menangani dan Menyelesaikan Potensi Sengketa di wilayah Perairan *South China Sea* (SCS)

4.2.1. Upaya menghindari potensi konflik

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menghindari potensi konflik di wilayah perairan *South China Sea* (SCS) menyusul adanya kemungkinan upaya penyelesaian konflik secara damai (*the amicable settlement of disputes*) oleh pihak yang terlibat sengketa. Salah satu upaya menghindari potensi konflik tersebut adalah melalui pendekatan perundingan secara damai baik secara bilateral maupun multilateral yang lazim digunakan mengelolah konflik regional dan internasional.

Untuk mencegah meluasnya potensi konflik yang melibatkan beberapa negara di kawasan seperti Cina, Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei, dan Taiwan, maka Indonesia sebagai salah satu negara yang terletak di sekitar kawasan itu memprakarsai berbagai perundingan dan memfasilitasi serangkaian pertemuan formal maupun informal untuk mencari formulasi resolusi konflik secara damai.

Kecenderungan adanya pendekatan perundingan dalam penyelesaian konflik secara damai di kawasan, mencerminkan dominasi pendekatan perundingan bilateral dari pada pendekatan perundingan multilateral. Kondisi ini terlihat ketika Cina menganggap seluruh pulau-pulau dan sebagian perairan di kawasan *South China Sea (SCS)* merupakan wilayahnya dan setiap negara yang mengklaim dan bahkan mengokupasi kawasan itu harus mengadakan perundingan bilateral dengannya hal ini berarti persetujuan yang mungkin dicapai oleh negara-negara yang bersengketa lainnya tidak akan menyelesaikan sengketa secara keseluruhan, kecuali antara pihak Cina dan negara yang bersengketa dengannya.

Cina nampaknya tidak memilih internasionalisasi atas sengketa teritorial walaupun pada prinsipnya Cina mengaku sepakat mengembangkan kerjasama di berbagai bidang seperti masalah keamanan dan keselamatan navigasi, perlindungan lingkungan kelautan serta berbagai kerjasama fungsional lainnya dengan negara-negara di kawasan.

Sedangkan upaya perundingan multilateral menuju terciptanya stabilitas di kawasan banyak mendapat dukungan negara-negara pengklaim yang semuanya adalah negara anggota ASEAN, kecuali

Taiwan. Hal ini beralasan mengingat perundingan regional atau multilateral, setidaknya dapat membantu semua negara pengklaim di kawasan itu untuk memiliki peluang dan posisi yang sama dalam mempertahankan klaim dan pendudukannya terutama dalam menghadapi tuntutan Cina. Sebaliknya Cina lebih memilih perundingan secara bilateral dengan masing-masing negara sengketa. Karena dengan cara ini Cina dapat lebih mudah menekan setiap negara dari pada menghadapinya secara bersama-sama.²⁶

Meskipun demikian, upaya perundingan bilateral maupun multilateral mempunyai kontribusi positif dalam meredam konflik yang berlangsung selama ini. Misalnya, April 1988, Cina-Vietnam melakukan perundingan dan menyatakan kesediaannya untuk berunding dengan Filipina dan Malaysia guna mencari *way out* dalam menghindari konflik melalui diskusi dan konsultasi. Dan pada tahun yang sama Cina juga terlibat pembicaraan dengan Filipina secara serius dan terbuka, dimana kedua negara sepakat untuk mengesampingkan masalah sengketa Spratly.

Selain itu, Filipina-Vietnam juga mengadakan perundingan dan menyetujui upaya pencegahan kekuatan bersenjata dalam penyelesaian

²⁶ Hasjim Djalal, *Konflik Laut Cina Selatan dan Ketahanan Regional*, (Yogyakarta: Aspinco, 1996), hlm.133-139.

sengketa yang didasari oleh semangat ASEAN/TAC. Dan pada Tahun 1995, dialog antara Vietnam dan Filipina berhasil merumuskan Sembilan point *Code of Conduct* dalam kerangka penyelesaian sengketa secara damai.²⁷

Kemudian Januari tahun 1992 Vietnam-Malaysia menyetujui kerjasama dalam membangun pulau-pulau Spartly, meskipun kerjasama tersebut “dibatasi pada wilayah tumpang tindih yang diklaim oleh kedua negara” akan tetapi pada kenyataannya kedua negara mengakui telah menyelesaikan sengketa teritorial yang meliputi wilayah tumpang tindih kedua negara. Pada bulan Desember 1992 menyusul telah diadakannya normalisasi hubungan Cina dengan Vietnam pada Tahun 1991, Cina-Vietnam melakukan perundingan diantara kedua belah pihak, dan sepakat menyelesaikan sengketa secara damai dan meningkatkan upaya kearah itu.²⁸

Dari sejumlah hasil yang dicapai melalui perundingan bilateral diatas khususnya Cina, Vietnam, Filipina, Nampak jelas bahwa mereka pada hakikatnya setuju mencari penyelesaian secara damai melalui konsultasi, membangun rasa percaya, membentuk berbagai kerjasama,

²⁷ Hasjim Djalal, *Posisi Negara-Negara Besar Menghadapi Potensi Konflik di Laut Cina Selatan*, Makalah yang disampaikan dalam Forum Dialog Politik dan Keamanan Regional dalam Era Pasca Perang Dingin, Yogyakarta, 7-10 Januari 1996, hal. 19.

²⁸ Mark. J. Valencia, *China And South China Sea Disputes*, Adelphi Papers 198, Oktober 1995, hal, 31.

dan berusaha menahan diri untuk tidak menggunakan kekuatan senjata. Dan yang lebih penting lagi adalah negara-negara tersebut setuju mengakui atau menyelesaikan sengketa atas dasar prinsip-prinsip Hukum Internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut 1982.

Usaha pengelolaan potensi konflik di kawasan ini, telah terlihat tanda-tanda upaya menuju kearah penyelesaian konflik secara damai melalui pendekatan perundingan secara multilateral. Hal ini terindikasi ketika Juli 1995 Cina memberikan sinyal dengan mengemukakan bahwa Cina akan mendiskusikan perbedaan di kawasan *South China Sea (SCS)* bersama dengan negara-negara anggota ASEAN. pernyataan ini mengukuhkan kesedian Cina untuk membicarakan sengketa *South China Sea (SCS)* secara multilateral.

Akan tetapi yang tidak diinginkan Cina adalah pembicaraan multilateral yang melibatkan negara luar, terutama Amerika Serikat. Cina memandang keterlibatan negara luar akan “menginternasionalisasi-kan” masalah sengketa di *South China Sea (SCS)*.

Oleh karena itu, walaupun perundingan-perundingan bilateral belum menyelesaikan sengketa, namun telah memberikan hasil-hasil yang cukup berarti dalam menghindari potensi konflik di *South China Sea*

(SCS) terutama dalam mengurangi ketegangan yang timbul di antara pihak-pihak yang bersangkutan.²⁹

Sementara itu, sejalan dengan kemungkinan penyelesaian konflik secara damai di kawasan *South China Sea* (SCS), maka penerapan konsep pengembangan kerjasama menjadi sesuatu yang relevan dalam upaya menghindari potensi konflik di kawasan melalui berbagai kegiatan patungan. Hal ini justru menarik minat sejumlah negara di kawasan karena pada dasarnya pengembangan kerjasama di *South China Sea* (SCS) akan dapat mendukung kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan semua negara kawasan khususnya bagi negara yang bersengketa.

Secara ekonomis negara-negara yang terlibat akan mendapatkan manfaat dari kerjasama eksplorasi dan eksploitasi kawasan *South China Sea* (SCS) untuk pembangunan nasional masing-masing, sedangkan secara politis, usaha-usaha kerjasama akan menciptakan hubungan baik dan mengurangi rasa curiga di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara maupun di Asia Pasifik.

Selain itu tidak terlepas komitmen Indonesia terhadap Regionalisme ASEAN yang juga memberi dorongan dalam rangka menciptakan

²⁹ Asnani Usman & Rizal Sukma, *Konflik Laut Cina Selatan Tantangan Bagi ASEAN*, (Jakarta: Centre For Strategic and International Studies, 1997), hlm. 61.

stabilitas kawasan. Bertitik-tolak pada idealisme bangsa Indonesia serta kenyataan-kenyataan yang berkembang di kawasan *South China Sea* (SCS), maka kondisi yang ingin diwujudkan di *South China Sea* (SCS) mencakup:

1. Sebagai kawasan damai, bebas dari pertikaian bersenjata serta bebas dari potensi senjata nuklir yang dapat membinasakan manusia dan kehidupannya.
2. Sebagai kawasan yang stabil, dihuni oleh negara-negara merdeka dan berdaulat, serta saling menghormati yuridiksi dan kedaulatan masing-masing negara.
3. Sebagai jalur perhubungan laut yang aman dapat dimanfaatkan oleh negara-negara yang memerlukannya dengan tetap menghormati hak dan kedaulatan negara-negara yang berada di kawasan tersebut sesuai dengan kesepakatan internasional.
4. Sebagai sumberdaya ekonomi, dapat dimanfaatkan oleh negara-negara yang terletak di daerah pesisirnya berdasarkan dengan pengaturan yang telah menjadi kesepakatan bersama secara tertib dan adil.³⁰

³⁰ *Trasformasi Potensi Konflik Menjadi Potensi Kerjasama di Laut Cina Selatan*, Program Pilihan Kelompok Internasional, Yayasan Pusat Studi Asia Tenggara, hal. 38.

Dalam upaya membantu mencegah berlarut-larutnya konflik dan dalam rangka menjalankan “*preventive diplomacy*”, Indonesia sudah melaksanakan sepuluh kali Lokakarya (*workshop*) mengenai *South China Sea* (SCS) yang pada hakikatnya merupakan jawaban terhadap peranan Indonesia dalam menyelesaikan masalah-masalah regional dan global.

Sampai sejauh ini, dari berbagai pertemuan dan dialog yang diprakarsai oleh Indonesia, secara tidak langsung mempunyai implikasi positif terhadap prospek penyelesaian secara damai masalah *South China Sea* (SCS). Ini dapat dilihat, masing-masing pihak yang terlibat dalam sengketa sepakat menahan diri dan meneruskan dialog kearah kerjasama yang saling menguntungkan, sekaligus diharapkan dapat menghilangkan sikap saling curiga dan menumbuhkan rasa saling percaya (CBM).

Karena itu, pengembangan kerjasama regional antar negara yang sama-sama berbatasan di *South China Sea* (SCS) merupakan yang mendasar untuk mengatasi perselisihan karena sebenarnya yang utama bukanlah masalah wilayah pemilikan masing-masing negara, tetapi bagaimana masalah pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah itu.

Berbagai upaya dan gagasan telah diajukan dalam rangka mencari suatu pemecahan terhadap masalah *South China Sea* (SCS), yaitu:

1. Traktat Spratly (*The Spratly treaty*), yaitu gagasan merumuskan suatu karangka legal yang dapat mengikat semua pihak yang bersengketa di *South China Sea (SCS)*, khususnya Cina, agar dicapai suatu penyelesaian secara damai melalui forum regional yang disepakati bersama seperti dalam konteks ARF.
2. Otoritas Spratly (*Spratly Othority*), gagasan pembentukan suatu Badan Otoritas yang berfungsi menangani semua aspek yang berkaitan dengan sengketa.
3. Kondominium Laut Cina Selatan (*A South China Sea Condominium*), gagasan untuk mengadakan semacam pemilikan atas wilayah *South China Sea (SCS)* yang menjadi sengketa sehingga mengesampingkan negara tertentu, memiliki hak eksklusif serta yuridikasi di kawasan *South China Sea (SCS)*.
4. Pembangunan bersama (*Joint Development*). Gagasan ini tengah diupayakan Indonesia Lokakarya *South China Sea (SCS)* yang intinya melaksanakan depolitisasi wilayah *South China Sea (SCS)* melalui pengembangan kerjasama fungsional.
5. Model Traktat Antartika (*The Antartic Treaty Model*), yaitu usulan untuk membekukan semua klaim untuk kemudian memusatkan kegiatan pada proyek-proyek kerjasama.

6. Traktat Kerjasama Celah Timor (*Timor Gap Cooperation treaty*), yaitu formula penyelesaian sengketa perbatasan laut yang telah diterapkan oleh Indonesia dan Australia.
7. Wilayah Demiliterisasi Laut Cina Selatan (*The South China Sea Demilitarized zone*), yaitu usul pembentukan zona bebas kegiatan militer sampai ditemukan suatu pemecahan masalah secara damai.
8. Diluar model-model di atas, Indonesia mengusulkan cara lain untuk menyelesaikan konflik, yaitu menggunakan “*Teori Donat*”. Teori ini di dasarkan atas asumsi bahwa pada “wilayah yang dituntut”, pihak-pihak yang bersengketa dapat mengembangkan kerjasama saling menguntungkan. Dengan demikian, teori ini di pandang sebagai cara yang paling cocok untuk mengurangi ketegangan di kawasan tersebut, karena merupakan pemecahan yang tepat atas “wilayah yang dituntu oleh banyak negara”.

Berbagai upaya dan gagasan tersebut, memerlukan kajian mendalam dan perundingan serta dialog yang secara intensif dalam menyamakan persepsi negara-negara pengklaim yang relevan bagi upaya penyelesaian konflik secara damai di kawasan *South China Sea (SCS)*.³¹

³¹ *op.cit.*, hlm. 143

4.2.2. Kerjasama Politik dan Keamanan ASEAN

Situasi dunia Internasional semakin menunjukkan perubahan ke arah banyaknya kerjasama pada tingkat subregional, regional maupun global. Kerjasama ini telah terjalin sangat baik untuk mewujudkan kepentingan ekonomi, politik dan keamanan dari semua negara di dunia. Pada tingkat kerjasama subregional Asia Tenggara, setidaknya ASEAN telah berfungsi sebagai forum yang efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, politik, sosial budaya dan bahkan masalah keamanan. Keberhasilan ASEAN dicerminkan oleh upaya mengatasi konflik-konflik bersenjata atau tindakan-tindakan provokatif sejak organisasi ini berdiri 1967.

Hingga saat ini Regionalisme ASEAN berfungsi sebagai instrumen untuk menyelesaikan krisis-krisis internal. Penyelesaian ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu. Mengurangi kemungkinan munculnya konflik di antara negara-negara tetangga dan memaksimalkan proses pembangunan ekonomi untuk menunjang peningkatan Ketahanan Regional secara kolektif. Oleh karena itu, regionalisme ASEAN sangat penting dikembangkan menjadi suatu kawasan yang lebih luas yaitu Regionalisme Asia Pasifik, dimana masalah-masalah regional seperti sengketa *South China Sea (SCS)* tidak hanya melibatkan negara-negara ASEAN akan tetapi juga negara-negara non-ASEAN seperti RRC dan Taiwan termasuk negara-negara yang tidak

terlibat langsung seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara kawasan lainnya. Hal ini penting karena cakupan Regionalisme Asia Pasifik akan semakin meningkatkan kekuatan kawasan dalam menangani bentuk-bentuk konflik regional yang sesungguhnya sangat menentukan bagi kepentingan nasional masing-masing negara kawasan.

Ada dua alasan yang melatarbelakanginya, *pertama*; proses pembangunan dapat berlangsung dengan meminimalkan campur tangan eksternal dalam menangani permasalahan internal. *Kedua*; Regionalisme akan memberikan suatu tingkat keamanan kawasan yang menghendaki tidak hanya kohesi internal, melainkan juga keseimbangan regional. Kawasan subregional ASEAN maupun regional Asia Pasifik dituntut untuk memadukan berbagai kepentingan negara-negara kawasan tersebut. Akhir-akhir ini ASEAN menghadapi tantangan untuk meningkatkan dan mempertahankan kawasannya yang damai dengan terus berlarut-larutnya sengketa antar negara kawasan di *South China Sea (SCS)*.

Oleh karena itu, suatu hal yang penting digaris bawahi dari eksistensi ASEAN adalah pembentukannya dan pencapaian tujuannya, disandarkan pada aspirasi, komitmen politik dan keamanan kawasan. Sejak pendiriannya (1967) terdapat empat keputusan organisasional ASEAN di bidang politik dan keamanan yang dapat dijadikan landasan dan instrumen dalam pengelolaan

potensi konflik di *South China Sea (SCS)*. Keempat keputusan organisasional tersebut yaitu:

- 1) Deklarasi Kuala Lumpur 1971 tentang Kawasan Damai, Bebas, dan Netral (*Zone of Peace, Freedom Neutrality-ZOPFAN*);
- 2) Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (*Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia-TAC*) yang dihasilkan pada KTT ASEAN I tahun 1976;
- 3) Pembentukan *ASEAN Regional Forum (ARF)* pada tahun 1992 (dan pertemuan pertama ARF dilakukan di Bangkok 1994);
- 4) KTT ASEAN V 1995 menghasilkan Traktat mengenai Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara (*Treaty on South East Zone-Nuclear Wepon Free Zone-SEANWFZ*).³²

4.2.2.1. *Instrument mencegah konflik South China Sea (SCS)*

Konsep ZOPFAN merupakan pengejawantahan dari sikap ASEAN yang sesungguhnya tidak mau menerima keterlibatan yang terlalu jauh dari negara-negara besar di wilayah Asia Tenggara. ASEAN mengusahakan pengakuan dan penghormatan Asia Tenggara sebagai zona damai, bebas dan netral oleh kekuatan luar seraya memperluas kerjasama antarnegara se-

³² *op.cit.*, 145.

kawasan sebagai prasyarat bagi “memperkokoh kekuatan, kesetiakawanan dan keakraban semua negara di kawasan”.

Terdapat pedoman pengusahaan konsep ZOPFAN yang pernah dirumuskan pada April 1972, pada dasarnya sangat relevan sebagai landasan dalam pengelolaan potensi konflik di kawasan, dimana esensi pedoman itu dapat meletakkan dasar bagi pembinaan kehidupan regional di Asia Tenggara seperti yang dituangkan kedalam TAC.³³ Begitu pula pedoman besar pengusahaan konsep ZOPFAN telah meletakkan dasar bagi pencipta suatu zona bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Gagasan Asia Tenggara sebagai suatu zona bebas senjata nuklir dikemukakan Indonesia dengan dukungan Malaysia pada *ASEAN Ministerial Meeting XVII* di Jakarta pada Juli 1984. Yang kemudian dikaitkan dengan ZOPFAN, sehingga SEA-NWFZ merupakan komponen dan persyaratan penting ZOPFAN.

Baik konsep ZOPFAN, NWFZ maupun TAC pada prinsipnya adalah “*zoning arrangement*” yang bagi Indonesia merupakan instrumen dasar konsep keamanan ASEAN yang juga dapat bertindak sebagai instrumen pembangunan kepercayaan di Asia Pasifik khususnya dalam mencegah

³³ Pedoman yang dimaksud adalah bahwa Regionalisme Asia Tenggara tidak boleh mengganggu “kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, keutuhan wilayah dan kepribadian nasional” setiap bangsa; bahwa setiap negara harus dapat “melaksanakan kehidupan nasionalnya bebas dari campur tangan, subversi atau tekanan dari luar”; bahwa tidak ada campur tangan “mengenai wawasan dalam negeri satu sama lain”, bahwa “setiap perselisihan atau persengketaan harus diselesaikan dengan cara-cara damai”; dan bahwa “setiap pengancaman dengan kekerasan” tidak dapat diterima.

konflik (*conflict prevention*) di *South China Sea (SCS)*. Pengusahaan ZOPFAN itu sendiri memiliki suatu *Programme of Action for ZOPFAN* yang dapat menjadi perangkat dalam mencegah konflik di kawasan. program tersebut mengandung beberapa unsur utama yaitu;

- 1) Memperkuat kerjasama bilateral dan trilateral antar negara-negara di Asia Tenggara.
- 2) Pengembangan suatu *Code of Conduct* yang mengikat negara-negara Asia Tenggara dan “negara-negara di sekitarnya”,
- 3) Pengembangan cetak biru (*blue print*) politik-keamanan untuk memungkinkan negara-negara sahabat membantu dalam membangun perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan di Asia Tenggara, serta
- 4) Mengembangkan kerangka untuk bekerja sesuai dengan Piagam PBB melanggengkan, dan membangun perdamaian.

4.2.2.2. *Peran ARF Mengatasi Potensi Konflik South China Sea (SCS)*

ASEAN Regional Forum (ARF) adalah forum dialog resmi antarpemerintah dan merupakan bagian dari upaya membangun saling percaya dikalangan negara-negara Asia Pasifik untuk membicarakan masalah-masalah keamanan regional secara lebih langsung dan terbuka.

Forum ini dibentuk pada 1993 saat diselenggarakan Konferensi Tingkat Menteri ASEAN (AMM) di Singapura dalam pertemuan *informal working dinner*. Negara-negara yang tergabung dalam ARF kini 21 negara, yaitu seluruh anggota ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja), sepuluh negara mitra dialog ASEAN (Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, Uni Eropa, Rusia, Cina, India), dan peninjau Papua Nugini.

Negara-negara di kawasan tidak bisa lagi mengeksploitasi persaingan adidaya, memainkan kartu Amerika Serikat dan Rusia untuk kepentingan keamanan di kawasan, sementara itu bagi negara-negara besar, runtuhnya Uni Soviet dan sistem bipolar menyebabkan nilai strategis di kawasan menjadi berkurang. Pada saat yang sama dinamika kawasan di Asia Pasifik masih menyimpan beberapa ketidakpastian, dimana salah satunya merupakan konflik-konflik teritorial khususnya konflik teritorial di *South China Sea (SCS)*.

Dengan demikian, ARF merupakan Forum multilateral yang pertama di Asia Pasifik untuk membahas isu-isu keamanan. Pembentukan lembaga ini merupakan sebuah langkah mendahului (*pre-emptive action*) oleh negara-negara ASEAN yang memberi arti sukses dan kemandirian pengelompokan

regional itu. Ini juga merupakan salah satu bukti keunggulan ASEAN dalam memanfaatkan momentum dan memainkan peranan penting dalam menentukan agenda keamanan kawasan. Misalnya keberhasilan ASEAN dalam melakukan dialog multilateral tentang masalah di *South China Sea* (SCS) keberhasilan tersebut merupakan upaya penting untuk mencegah pecahnya konflik antarnegara yang terlibat sengketa perbatasan di kawasan Asia Pasifik.

Pertemuan ARF pertama di Bangkok Juli 1994 menyatakan bahwa *Treaty of Amity and Cooperations in South East Asia* (TAC) perlu dijadikan *Code of Conduct* dalam mengatur hubungan antarnegara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu TAC instrument diplomatik satu-satunya bagi pembinaan rasa saling percaya di kawasan, diplomasi preventif, serta kerjasama politik dan keamanan. Sebagai alat untuk membina rasa saling percaya (CBMs), TAC berguna untuk mengurangi timbulnya konflik dan juga dapat meningkatkan kualitas lingkungan politik di kawasan.

Tindakan konkret lainnya dalam penanganan potensi konflik di *South China Sea* (SCS) adalah, dengan mengupayakan negara-negara di kawasan dapat memperkuat transparansi dan kerjasama politik dan keamanan antarnegara-negara Asia Pasifik, misalnya perlu dilakukan kerjasama di bidang pertukaran informasi intelejen, prosedur manajemen krisis

sebagaimana yang tercantum dalam TAC, pembentukan pasukan penjaga perdamaian dan unit keamanan maritim untuk menjaga perairan kawasan menuju kepentingan keamanan bersama.

Dalam mengatasi dan mencegah konflik di *South China Sea (SCS)* langkah CBM diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan persepsi yang salah, kecurigaan dan kekhawatiran, dengan saling memberikan informasi tentang kapabilitas militer mereka.

Sementara itu, dalam upaya mencapai sasaran ARF terdapat tiga langkah yaitu, (1) untuk membangun saling percaya (*confidence building measure /CBM*), (2) diplomasi preventif (*preventive diplomacy*), dan (3) penyelesaian konflik (*conflict resolution*). Untuk langkah *pertama* paling tidak sudah dapat digambarkan melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh ISG tersebut, melingkupi pencegahan konflik potensial di *South China Sea (SCS)*. Sementara langkah *kedua* meliputi pengembangan prinsip dasar untuk mencapai pengertian bersama di kawasan dan adopsi pendekatan keamanan. Penerapan langkah kedua ini pada dasarnya telah dan sedang dilakukan dalam upaya pengelolaan potensi Konflik di *South China Sea (SCS)*.³⁴

³⁴ *op.cit.*, hlm.153.

Disadari pula, tantangan yang dihadapi ARF dalam mengimplementasikan upaya diplomasi preventif dalam menangani kompleksitas klaim wilayah atau masalah sengketa kedaulatan di *South China Sea (SCS)*, hakikatnya sulit untuk diatasi dalam waktu yang singkat.³⁵

Langkah *ketiga* dari sasaran ARF pendekatan penyelesaian konflik. Ini merupakan pendekatan yang paling rumit dan membutuhkan waktu yang cukup panjang, sebab menyangkut keputusan tentang mekanisme apa yang ingin dikembangkan dalam mewujudkan kerjasama keamanan ARF, terlebih lagi pada model yang harus dilakukan dalam kerangka resolusi konflik masalah sengketa tumpang tindih oleh enam negara di *South China Sea (SCS)*. Namun demikian bila langkah ARF tersebut merupakan pendekatan pengendalian konflik, maka cara ASEAN dalam meredam konflik dan menjaga hubungan yang baik antara anggotannya mungkin dapat diterapkan dengan melalui cara non komprontatif dan pendekatan *constructive engagement*. Dengan demikian berbagai potensi konflik yang sewaktu-waktu muncul dapat diselesaikan secara baik sehingga tidak mengancam kerjasama ARF. Dari uraian di atas nampak bahwa ARF memiliki peran yang signifikan dalam berbagai isu keamanan yang menyimpan sejumlah potensi konflik.

³⁵ Media Indonesia, 10 Juni 2011.

Oleh karena itu dalam proses pengelolaan potensi konflik yang lebih condong pada penggunaan kekuatan militer di kawasan khususnya peragaan kekuatan militer Cina yang digelar di kawasan *South China Sea (SCS)* memungkinkan bagi ARF untuk sedini mungkin menekan kekuatan itu dan bahkan secara bertahap meniadakannya (*reducing and eliminating power*), karena bila dilihat dari perkembangan ARF telah berhasil memberikan beberapa solusi alternative kerjasama keamanan di kawasan atas kepentingan bersama melalui program pengelolaan persenjataan (*arms control*), pelaksanaan diplomasi preventif melalui *confidance building*, *institution building*, dan *early warning mechanism*.

4.2.3. Hasil-Hasil Lokakarya South China Sea (SCS)

Salah satu langkah dalam menangani potensi konflik di *South China Sea (SCS)* adalah melaksanakan Lokakarya (*workshop*).³⁶ Lokakarya tersebut berupaya mengalihkan potensi konflik menjadi potensi kerjasama sebagai alternatif mendorong terciptanya *peaceful conflict resolution*.

Bertolak dari situasi dan kondisi tersebut, maka pengelolaan potensi konflik *South China Sea (SCS)* dilakukan melalui pendekatan informal dan

³⁶ *Workshop* (Lokakarya) ini adalah bentuk media perantara (mediasi, konsolidasi, fasilitasi) yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang biasanya menghadirkan perwakilan pihak-pihak terkait dalam suatu pertemuan yang bersifat *triangular* dalam struktur tertentu., Christopher Mitchell and Michael Banks, *Hand Book of Conflict Resolution, The Analytical Problem Solving Approach*, Pinter, New York, 1996, hal. 18.

tidak saja sekedar untuk mencegah konflik tetapi juga untuk segera menyelesaikannya.

Perkembangan dari hasil-hasil Lokakarya *South China Sea (SCS)* terlihat ketika pertama kali diadakan di Bali, 22-24 Januari 1990 yang hanya diikuti oleh peserta dari enam negara ASEAN dan para ahli dari Kanada sebagai nara sumber. Lokakarya ini menyepakati bahwa untuk menyelesaikan sengketa kedaulatan dan yurisdiksi kawasan di *South China Sea (SCS)*, haruslah menggunakan cara-cara damai. Cara-cara damai dalam menangani konflik-konflik ini mutlak diperlukan untuk membawa semua permasalahan yang ada ke dalam suasana iklim yang kondusif untuk melakukan upaya-upaya perundingan. Disepakati pula bahwa dialog dalam forum Lokakarya tersebut perlu diperluas baik masalah/substansinya maupun negara-negara yang dilibatkan dalam forum tersebut.³⁷

Lokakarya *South China Sea (SCS)* kedua di Bandung, 15-18 Juli 1991, telah meletakkan pondasi untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi penyelesaian klaim yang tumpang tindih yaitu dengan menyepakati tidak digunakannya kekerasan dalam penyelesaian sengketa dan memberi komitmen untuk menyelesaikan sengketa melalui cara-cara damai dan negosiasi.

³⁷ Litbang Deplu R.I., *Report of the Workshop on Managing Potensial Conflict in the South China Sea*, Bali, 22-24 Januari 1990, hal.22-24.

Wilayah-wilayah yang terdapat klaim territorial yang tumpang tindih, negara-negara yang terlibat harus mempertimbangkan kemungkinan diciptakannya kerjasama yang saling menguntungkan, termasuk kerjasama dalam pertukaran informasi dan pembangunan.³⁸

Lokakarya ketiga 28 Juni - 2 Juli 1992 di Yogyakarta, berhasil meningkatkan kerjasama yang mengarah pada spesifikasi kerjasama di bidang maritim dengan berupaya menanggalkan masalah-masalah sengketa kedaulatan di kawasan. Langkah nyata dari Lokakarya ini adalah disetujuinya topik-topik yang akan dilaksanakan dua kelompok kerja terdiri dari para ahli masing-masing negara peserta. Dua topik tersebut adalah pertama, *Resources Assessment and Ways of Development* dan Kedua, *Marine Scientific Research*.³⁹

Lokakarya keempat 23-25 Agustus 1993 di Surabaya mulai mengidentifikasi sejumlah wilayah potensi untuk kerjasama di berbagai bidang. Kelompok kerja yang dibentuk itu adalah: (1) *Technical Working Group on Resources Assessment and Ways of Development* (TWG-RAWD) atau Kelompok Kerja Teknik mengenai *assessment* terhadap sumber-sumber kekayaan alam dan cara pengembangannya; (2) *Technical Working Group*

³⁸ Litbang Deplu R.I., *The Second Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea*, Bandung 15-18 Juli 1991, hal. 73-75.

³⁹ Litbang Deplu R.I., *The Third Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea*, Yogyakarta, 28 Juni-2 Juli 1992, hal. 83-84.

on Marine Scientific Research (TWG-MSR) atau Kelompok Kerja Teknik mengenai Penelitian Ilmiah kelautan.⁴⁰

Lokakarya kelima 23-26 Oktober 1994 di Bukittinggi, *Technical Working Group on Marine Scientific Research* (TWG-MSR) di Singapura 24-29 April 1994, setiap peserta diminta mengajukan *one marine expert* yang akan menjadi anggota dari *Group of Experts on Biodiversity* yang telah dibentuk.⁴¹ Lokakarya sepakat melibatkan organisasi-organisasi internasional seperti WPFCC (*Western Pasific Fisheries Consultative Committee*) dan PECC (*Pasific Economic Cooperation Council*) yang berhubungan dengan pengembangan kawasan *South China Sea* (SCS).

Lokakarya keenam 10-13 Oktober 1995 di Balikpapan, membahas agenda *Technical Working Group on Safety of Navigation, Shipping and Communication* (TWG-SNSC) dalam upaya menangani masalah-masalah pembajakan serta kerjasama dalam penegakkan hukum di laut. Pertemuan mencatat delapan prinsip *code of conduct* yang telah disetujui antara RRC dan Filipina.

Pada Lokakarya ketujuh 13-17 Desember 1996 di Batam, dibahas beberapa pertemuan TWG dan membahas hal-hal yang perlu ditindak lanjuti.

⁴⁰ Litbang Depli R.I. *The Fourt Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea*, Yogyakarta, 23-25 Agustus 1993, hal. 73-78.

⁴¹ Litbang Deplu R.I. *The Fifth Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea*, Bukittinggi, 23-26 Oktober 1994, hal. 53-55.

Lokakarya ini sepakat menyelenggarakan pertemuan *Group of Expert on Education and Training of Mariners and Seafarers*, serta penyelenggaraan *Group of Experts in Hydrography and Mapping*.⁴² CBM, dalam Lokakarya ini gencar di bicarakan, karena mereka melihat bahwa CBM sangat esensial untuk meminimalkan ketegangan, menghindari konflik, memajukan kerjasama dan memfasilitasi atmosfer yang kondusif bagi penyelesaian perselisihan secara damai dan diharapkan banyak melibatkan pemerintah dalam melakukan perundingan baik resmi atau tidak resmi dalam lingkup multilateral (regional) maupun bilateral.

Lokakarya kedelapan 2-6 Desember 1997 di Pacet, Puncak mengalami banyak kemajuan diantaranya mencakup realisasi rencana pada Lokakarya ketujuh sebelumnya. Peserta Lokakarya ini menyetujui bahwa proses Lokakarya kedelapan memfokuskan pada tahap implementasi dari program-program dan proyek-proyek yang telah disetujui untuk kerjasama.

Pada Lokakarya kesembilan 1-3 Desember 1998 di Ancol Jakarta, telah secara nyata mulai bekerjasama di bidang "*Marine Scientific Research*" dan di bidang "*Marine Environmental Protection*" dengan berusaha untuk menginformasikan kepada "*United Nation Environmental Program*" (UNEP). Diharapkan dengan keikutsertaan UNEP adalah untuk mengimplementasikan

⁴² Litbang Deplu R.I. *The Seventh Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea*, Batam Desember 1996, hal. 65-69.

beberapa komponen dari proyek-proyek *biodiversity* yang akan dimuat dalam *UNEP's Strategic Action*.⁴³

Sedangkan hasil Lokakarya yang kesepuluh 5-8 Desember 1999 di Bogor, tidak jauh berbeda dengan perkembangan pada Lokakarya sebelumnya, hanya menindak lanjuti rencana-rencana yang telah diagendakan selama Lokakarya dilaksanakan. Pada prinsipnya Lokakarya ini tetap membicarakan bagaimana mempromosikan CBM, mengembangkan dialog-dialog serta menunjukan kerjasama yang konkret di *South China Sea (SCS)*. Selain itu, dengan dicetuskannya *Declaration on the South China Sea* pada tanggal 2 Juli 1992 di Manila secara tidak langsung mendesak negara-negara yang bersengketa untuk menahan diri dan mengusahakan pengembangan bersama dan sementara mengesampingkan masalah kedaulatan.

Deklarasi *South China Sea (SCS)* merupakan sikap resmi ASEAN mengenai sengketa di kawasan *South China Sea (SCS)* khususnya kepulauan Spratly. Dengan diadakannya Lokakarya mengenai *South China Sea (SCS)*, negara-negara yang berada di sekitar *South China Sea (SCS)*, terutama negara-negara ASEAN memiliki peluang yang cukup besar untuk

⁴³ Statement of the Ninth Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea, Ancol, Jakarta, Desember, 1998, hal. 1-3.

meningkatkan CBM dalam hal masalah sengketa teritorial atau masalah Kepulauan Sparty khususnya dengan RRC.

4.2.4. Pengelolaan Keamanan Berdasarkan Kepentingan yang Sama

Dalam pengelolaan potensi konflik di *South China Sea (SCS)*, secara umum ada dua mekanisme integratif yang dapat diupayakan dalam pengelolaan keamanan berdasarkan kepentingan yang sama. *Pertama* adalah “koordinasi multilateral”, yaitu negara-negara yang ada di Asia Pasifik terlibat di dalam komunikasi dan koordinasi untuk menghadapi setiap gangguan dan ancaman terhadap perdamaian.

Kemungkinan *kedua* yaitu adanya kebijaksanaan “*common security*” dalam bentuk harmonisasi dan asosiasi. Secara teoritis mekanisme ini merupakan ekspresi adanya sikap bersama yang cukup terpadu menghadapi ancaman keamanan bersama. Oleh karena itu mekanisme ini mendorong munculnya “*coordinated action*” dalam wujud *common effort on security*. Lebih jauh lagi, dengan asumsi bahwa ancaman datang dari luar (kawasan), maka negara-negara yang tergabung di dalam “*common security*” cenderung berkembang menjadi “pakta keamanan bersama” (*alliance*).

4.2.4.1. Koodinasi Multilateral

Berkaitan dengan pandangan idealisme tersebut, maka menata lingkungan keamanan Asia Pasifik dari berbagai benih-benih konflik merupakan keniscayaan yang harus diwujudkan. Adanya potensi konflik yang dapat mengancam stabilitas regional harus segera diredam atau paling tidak dihindari seingga situasi yang penuh ketidakpastian dapat berubah menjadi situasi aman dan damai. Karena itu, unsur-unsur potensi konflik di *South China Sea (SCS)* harus menjadi agenda utama regional untuk dikelola menjadi potensi kerjasama dalam rangka meningkatkan ketahanan Regional.

Dalam koordinasi multilateral/regional keamanan, membuka peluang yang besar untuk memberi kesempatan kepada negara-negara di kawasan guna mengajukan gagasan baru yang konstruktif, sekaligus dapat melahirkan kesempatan serta formulasi pengembangan kerjasama yang relevan dalam mengatasi potensi konflik di *South China Sea (SCS)*.

Perlu digaris bawahi bahwa pengelolaan keamanan berdasarkan kepentingan yang sama melalui “koordinasi multilateral” dapat merupakan sarana atau wahana dalam mewujudkan suatu tujuan/maksud tertentu, yang ditinjau dari segi strategis dapat mewujudkan stabilitas kawasan, karena itu akan dapat menciptakan terjalinnya kontak-kontak diantara

negara-negara kawasan yang pada ujungnya berdampak efektif mengurangi kecurigaan dan ketegangan di kawasan *South China Sea* (SCS).

4.2.4.2. Common Security

Keamanan bersama (*common security*) pertama kali diucapkan oleh Komisi Bebas Isu-Isu Perlucutan Senjata dan Keamanan yang diketuai almarhum **Olaf Palme**. Kebijakan *common security* sangat relevan diterapkan untuk menjamin Keamanan di Asia Pasifik khususnya dalam mengatasi potensi konflik di *South China Sea* (SCS). Hal ini sangat beralasan bila secara konsisten dapat memenuhi enam point prinsip-prinsip *common security* sesuai pandangan yang dilaporkan "*The Palme Commission*" yaitu:

- 1) *All nation have a legitimate right to security;*
- 2) *Military force is not a legitimate instrument for resolving disputes between nations;*
- 3) *Restrain is necessary in expression of national policy;*
- 4) *Security cannot be attained through military superiority;*
- 5) *Reduction and qualitative limitations of armaments are necessary for common security*

6) “*linkage*” between arms negotiations and political events should be avoid.⁴⁴

Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa *common security* paling tidak dapat diterapkan sebagai bentuk pendekatan preventif dalam masalah-masalah keamanan di kawasan khususnya dalam kerangka strategi melindungi keamanan nasional. Diantara negara-negara ASEAN misalnya, istilah Ketahanan Nasional dan Ketahanan Regional menjadi suatu konsep kooperatif yang pada intinya bersifat *inward looking* yang telah lama mendasari hubungan antarnegara. Dengan demikian dalam usaha mewujudkan kerjasama keamanan tersebut harus dibarengi dengan semangat konstruktif dan penuh keterbukaan di antara negara-negara ASEAN maupun Asia Pasifik. Inti semangat itu adalah mendahulukan *konsultasi* ketimbang konfrontasi, *menentramkan* ketimbang menangkak, *transparansi* ketimbang pengrahasiaan, *pencegahan* ketimbang penanggulangan dan *Interdependesi* ketimbang unilateralisme.

⁴⁴ Olaf Plame et.al., *Common Security: A Blueprint for Survival*, New York, Simon and Schuster, 1982, hal. 7-11.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian dan pembahasan diatas maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dalam menyelesaikan potensi konflik di wilayah perairan *South China Sea (SCS)*, dengan melihat sudut pandang hukum internasional atas kepulauan Sparty, maka kita bisa mengacu kepada hukum laut internasional PBB, yaitu UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982. Dimana prinsip dan segala sesuatu yang dapat menimbulkan konflik diatur dalam UNCLOS 1982 dengan mengharuskan pihak-pihak yang bersengketa berunding antar negara untuk mencapai kesepakatan dan keadilan tanpa adanya konflik. UNCLOS 1982 dapat menjadi dasar bagi penetapan batas-batas maritim antara negara-negara yang terlibat dalam sengketa Spratly.
2. Peran Organisasi ASEAN dalam menyelesaikan potensi konflik yang terjadi di wilayah perairan *South China Sea (SCS)*, Terdapat 2 cara yaitu; (1) penyelesaian secara bilateral, (2) penyelesaian secara multilateral dimana semua negara-negara yang terlibat duduk bersama

membicarakan penyelesaian masalah baik dalam lingkup internasional ataupun dalam forum regional. Adapun Upaya-upaya dalam mencegah atau menghindari potensi konflik di wilayah perairan *South China Sea (SCS)* yaitu dengan melibatkan Indonesia untuk memprakarsai berbagai perundingan dan memfasilitasi serangkaian pertemuan formal maupun informal. Diantaranya yaitu; *Penyelenggaraan kerjasama dan Technical Working Groups, Groups of Experts dan Study Groups*. Demikian pula terdapat empat keputusan organisasi ASEAN yang dijadikan landasan dan instrumen dalam pengelolaan konflik di *South China Sea (SCS)*.

5.2. Saran

Adapun saran yang Penulis ajukan dalam skripsi ini yaitu :

1. Masing-masing negara yang terlibat dalam sengketa di *South China Sea (SCS)* dapat memperhatikan batasan laut yang dapat dipersengketakan. Dalam hal ini juga UNCLOS 1982 dapat diratifikasi oleh masing-masing negara yang terlibat dalam sengketa wilayah di *South China Sea (SCS)*. Agar terciptanya aturan yang sesuai dengan Penyelesaian potensi sengketa di wilayah perairan *South China Sea (SCS)* yang melibatkan beberapa negara di Asia Tenggara dan Asia

Pasifik (negara anggota ASEAN dan Cina) sehingga tidak terjadi klaim tumpang tindih atas Zona Ekonomi Eksklusif suatu negara.

2. Dalam menyelesaikan potensi konflik di wilayah perairan *South China Sea* (SCS). Peran Organisasi ASEAN sangat di perlukan, di karenakan negara-negara yang melibatkan dalam sengketa wilayah adalah ASEAN sendiri. Oleh sebab itu dengan di bentuknya *Code of Conduct* (Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di *South China Sea*) dapat diterapkan dan disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini juga Peran Organisasi ASEAN dalam menyelesaikan sengketa lebih dimaksimalkan, agar tidak terjadi konflik yang meluas di wilayah perairan *South China Sea* (SCS) antar negara anggota. Dan instrumen-instrumen penyelesaian sengketa ASEAN lebih direalisasikan dalam penerapan konsep pengembangan kerjasama di *South China Sea* (SCS) dengan mendukung kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan semua negara kawasan khususnya bagi negara yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asnani Usman dan Rizal Sukma, *Konflik Laut Cina Selatan Tantangan Bagi ASEAN*. Jakarta: Centre For Strategic and International Studies, 1997.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni.
- Bantarto Bandoro Ananta Gondomono, *ASEAN dan Tantangan Satu Asia Tenggara*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies..
- Didik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya Di Indonesian*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2011.
- Hasyim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta: Binacipta, 1979.
- Hasyim Djalal, *Konflik Laut Cina Selatan dan Ketahanan Regional Asia Pasifik*. Yogyakarta: ASPINDO, 1996.
- Hilton Ternama Putra, Eka An Aqimuddin, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa ASEAN Lembaga dan Proses*. Bandung: Graha Ilmu.
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- H.E. Andri Hadi, Regionalisme, Free Trade, and Human Rights Protection..
- John Collier and Vaughan Lowe, *The Settlement of Dispute in International Law: Institution and Prosedures*, Oxford University Press, New York, 2000.
- Jahawir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Yogyakarta: PT. Refika Aditama, 2006.
- Luhulima, *ASEAN Menuju Postur Baru*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies..

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut*. Jakarta: Binacipta.

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta: Binacipta, 1986.

Syahmin, *Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional*. Bandung: CV. Armico, 1988.

Peraturan

Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS)

Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea

DEKLARASI ASEAN 1967

Piagam ASEAN 2007

Koran

Media Indonesia, Isu Laut Cina Selatan Dibahas, 2 Juli 2012.

Internet

Konvensi Hukum Laut, di akses dari <http://www.scribd.com/doc/114966544/UNCLOS-1982>., pukul 23:44, 2 november 2013

Sengketa South China Sea, di akses dari www.lemhannas.go.id/.../1960_tannas%20karmin%20... Pukul 23:47, 2 November 2013

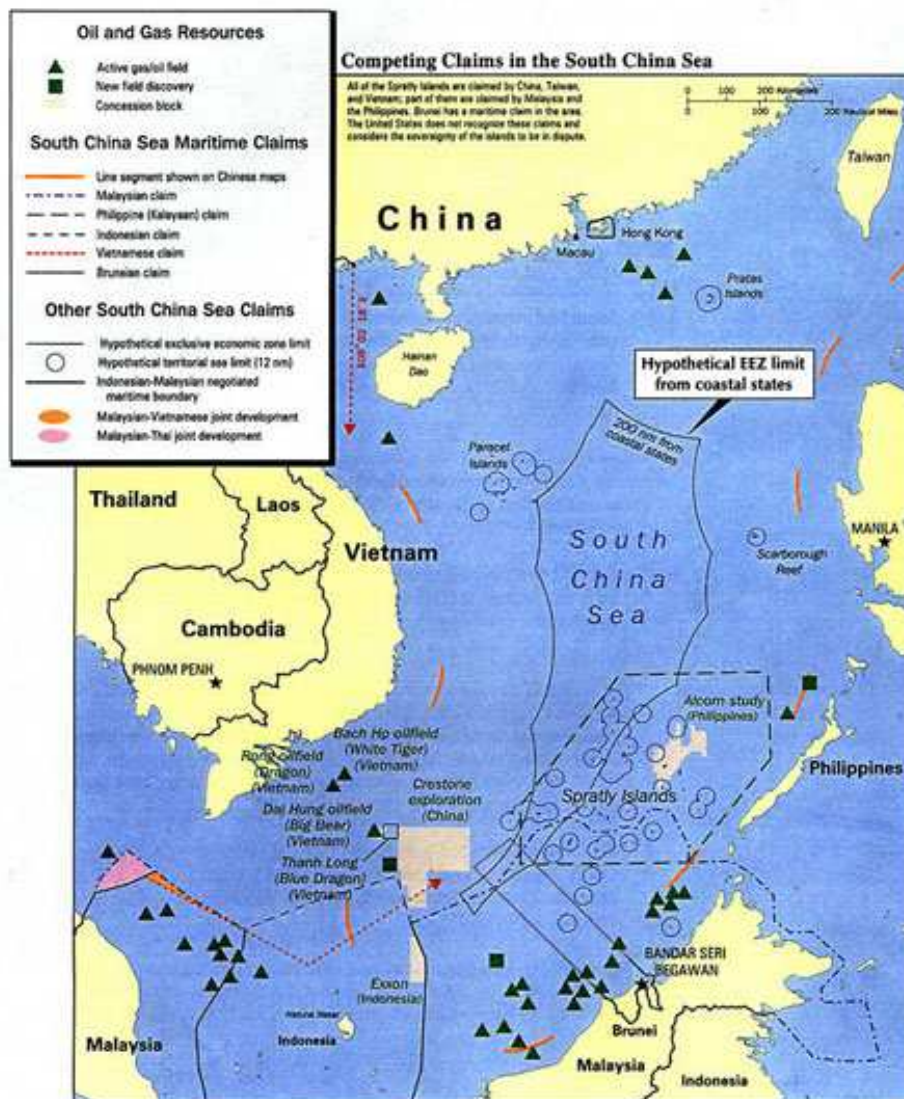
<http://irjournal.webs.com/apps/blog/show/4113964>, di akses, Pukul 02.53. 18 Januar 2014

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1

Peta Laut Cina Selatan



Gambar 2

Tuntutan seluruh kawasan South China Sea oleh cina



Gambar 3

Peta kepulauan Spratly dan Paracel

